



VOLUME XIII / NO. 128 / MEI 2018

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL



PANGKAS REGULASI, PERMUDAH INVESTASI

Naiknya peringkat Ease of Doing Business Indonesia memberikan kabar gembira bagi pelaku usaha. Demi menciptakan iklim investasi yang semakin baik, pemerintah memangkas regulasi yang tumpang tindih. Jalan untuk berinvestasi semakin mudah.

Daftar Isi



5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 15 Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha
- 18 Infografis
- 20 Deregulasi dan Simplifikasi Dorong Kemudahan Investasi
- 23 Tanggapan Dunia Usaha terhadap EoDB
- 25 EoDB untuk Pertumbuhan Investasi

WAWANCARA

- 27 Masuk Tol Aman dan Nyaman

POTRET KANTOR

- 30 Tulang Punggung Penerimaan Kalimantan

FIGUR

- 32 Mengawal Reformasi Membangun Negeri

EKONOMI TERKINI

- 36 Di Tengah Potensi dan Risiko Global

KOLOM EKONOMI

- 40 Defisit APBN dan Belanja Berkualitas

GENERASI EMAS

- 44 Melawan Malnutrisi dengan Ketahanan Pangan

OPINI

- 46 Membaca Arah Super Holding BUMN Indonesia

REGULASI

- 48 Perluas Basis Investor, Pemerintah Terbitkan SUN Ritel Online

INSPIRASI

- 50 Jatuh Cinta pada Sejarah

RENUNGAN

- 52 Bekerja Dengan Visi

FILM

- 53 "Ready Player One": Petualangan di Dunia Virtual Reality

JALAN-JALAN

- 54 Kepulauan Derawan yang Menawan

SELEBRITI

- 56 Dosen Sutradara Yang Mendunia

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulistiati. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Riva Setiara, Adya Asmara Muda, Hadi Suroho, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Maria Cecilia Kinanti, Ferdian Jati Permana, Hadi Suroho, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhsinin. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Prihariyanto, Andi Al Hakim, Rhoric Andra F., Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman, . **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Media Keuangan meraih
4 GOLD WINNER
Public Relation Indonesia Award 2018

Pada PRIA 2018, Kementerian Keuangan mendapatkan 1 Platinum Trophy, 10 Gold Trophy, 4 Silver Trophy, dan 1 Bronze Trophy:

PLATINUM

Juara Umum kategori Kementerian Public Relations Indonesia Award 2018

GOLD

Media Cetak Internal: majalah Media Keuangan edisi September 2017
Media Cetak Internal: majalah Media Keuangan edisi Oktober 2017
E-Magazine: majalah Media Keuangan edisi April 2017
E-Magazine: majalah Media Keuangan edisi Mei 2017
Website: www.kemenkeu.go.id
Website: www.pajak.go.id
Government Public Relations: Edukasi APBN
Digital Public Relations: #sadarAPBN
Department Public Relations
Manual Kehumasan Direktorat Jenderal Pajak

SILVER

Annual Report: Laporan Tahunan Kementerian Keuangan
Media Sosial: @KemenkeuRI
Corporate Social Responsibility: Kemenkeu Mengajar
Media Cetak Internal: Auditoria Vol 9/2017

BRONZE

Panduan Krisis: wawancara LPDP

Dari Lapangan Banteng

Mengerek Peringkat Kemudahan Berbisnis

Ease of Doing Business (EoDB) merupakan salah satu *standard* yang diakui dunia internasional sebagai acuan para investor untuk melakukan usaha atau berinvestasi di suatu negara. Peringkat yang dikeluarkan satu tahun sekali oleh World Bank Group ini dinilai berdasarkan sepuluh indikator penilaian dari hasil survey di masing-masing negara terkait, termasuk diantaranya Pembayaran Pajak dan Perdagangan Lintas Negara.

Indonesia saat ini berada di peringkat 72, tahun sebelumnya berada di peringkat 91. Dalam waktu 6 tahun, EoDB Indonesia naik dari 129 menjadi 72. Tentu saja ini capaian yang luar biasa bagi Indonesia. Dengan standar metodologi yang terukur, World Bank tidak akan sembarangan memberikan peringkat kepada negara yang di survei. Hasil EoDB akan menjadi acuan bagi para calon investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Apa pengaruh peringkat tersebut bagi masyarakat Indonesia? Peringkat ini artinya ada kepercayaan yang bertambah kepada Indonesia sebagai negara yang layak investasi. Kepercayaan ini penting,

karena akan membuat para investor berani untuk melakukan investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang, bukan hanya untuk dijadikan spekulasi sesaat.

Ditambah dengan berbagai fasilitas kemudahan melakukan bisnis dan insentif perpajakan oleh pemerintah, kenaikan peringkat ini akan semakin dapat mengakselerasi investasi ke Indonesia. Melalui bertambahnya investasi di Indonesia, maka akan semakin bertambah pula lapangan pekerjaan, yang otomatis menekan angka pengangguran. Tingkat kemiskinan juga diharapkan akan menurun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi.

Pemerintah akan selalu berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik untuk dapat memperbaiki iklim investasi ini. Berbagai macam simplifikasi peraturan dan proses bisnis diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan usaha di Indonesia. Kementerian Keuangan juga turut serta melakukan simplifikasi peraturan.

Sampai dengan tanggal 16 Maret 2018, regulasi berupa Peraturan Menteri

Keuangan (Menkeu) dan Ketentuan Menkeu yang terbit tahun 2006 s.d. 2015 telah dipangkas sebanyak 1.474 regulasi atau sebesar 61,2 persen dari jumlah awal. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu sebesar 50 persen.

Selanjutnya, selama tahun 2016 dan 2017, telah dilakukan simplifikasi dari 184 menjadi 56 Peraturan/Ketentuan Menkeu. Selain simplifikasi regulasi yang telah ada, pada tahun 2017, Kementerian Keuangan juga menerbitkan 25 Peraturan Menkeu dalam rangka penyederhanaan proses bisnis dan juga melakukan penyederhanaan persyaratan administrasi untuk pendaftaran Wajib Pajak dan penguatan Pengusaha Kena Pajak dalam rangka EoDB. Lebih lanjut, di tahun 2018 ini, sedang disusun regulasi di bidang kepabeanan dan cukai, pengelolaan utang, perpajakan, dan profesi jasa keuangan untuk percepatan Pelaksanaan Berusaha (EoDB).

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @kemenkeuRI

Sampaikan masukan & dukunganmu atas fasilitas yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha!

@dimas99999999

Tingkat kemudahan berusaha segera diimplementasikan melalui Single Sign On. Utk membuat izin memulai usaha tdk perlu membawa berkas yg bertumpuk2 di msg2 instansi. Semua instansi berkumpul dlm satu portal perizinan online

Selain itu mulai menerapkan manajemen resiko, dmn verifikasi dilakukan setelah pengurusan perizinan. Ada instansi yg membutuhkan waktu pengurusan izin sampai 20 hari, terlalu lama. Tingkat kepatuhan perpajakan sbg tools utk pengawasan

@agustina_jkt

Setuju dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, dari tax holding, restitusi dan pengembangan PLB. Disamping itu diharapkan segala perizinan dpt dipermudah dgn tdk pandang skala bisnis besar / kecil.

@yadinbisa

Fasilitas & kebijakan yg diberikan pemerintah saat ini sudah bagus dlm mendukung kemudahan berusaha. Tp pemerintah perlu melakukan perbaikan agar iklim berusaha lbh baik, spt koordinasi antarinstansi, antara pemerintah pusat & daerah.

Panoramic Toll Road

Gerbang tol Bawen-Salatiga ini memang memiliki pemandangan yang indah. Dengan latar belakang Gunung Merbabu ditambah deretan sawah yang membentang luas, pengendara bisa menikmati keindahan yang tiada duanya. Jalan tol Bawen- Salatiga merupakan bagian dari Tol Semarang- Solo yang memiliki total panjang 75,2 kilometer. Pembiayaan tol Semarang-Solo mendapatkan dukungan APBN dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Keberadaan jalan tol diharapkan menjadi salah satu alternatif mengatasi kepadatan lalu lintas di jalan arteri, serta dapat meningkatkan arus distribusi barang dan jasa di Pulau Jawa.

Foto
Cahyo Afif
Nugroho



Menikmati Sakura di Tanah Kelahirannya

Sakura adalah simbol musim semi (*Spring*) di tanah kelahirannya. Namun, periode musim mekar sakura di setiap kota bervariasi, tergantung pada lokasi, iklim, dan ketinggian. Tahun ini, sakura bermekaran lebih cepat satu minggu dari perkiraan. Saat bunga sakura bermekaran, masyarakat Jepang memiliki tradisi yang disebut dengan hanami atau tradisi melihat bunga. Hanami juga dinikmati dengan piknik menggelar tikar untuk pesta dan makan-makan di bawah pohon sakura.

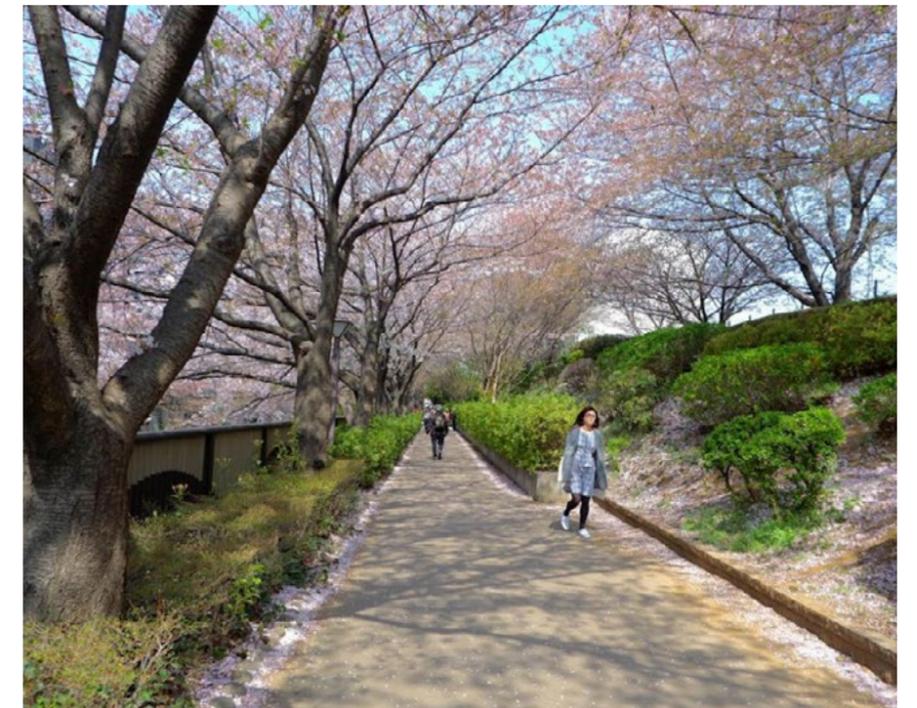


Foto dan
teks
Dianita
Sulastuti

02/04

Teks
Biro KLIFoto
Biro KLI

Konferensi Pers Kemudahan dan Insentif terkait Perpajakan dan Kepabeanaan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Konferensi Pers Kemudahan dan Insentif terkait Perpajakan dan Kepabeanaan pada Senin (02/04) untuk mensosialisasikan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Aula Djuanda Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB) dengan beberapa kebijakan baru di bidang perpajakan dan bea cukai, yang diharapkan akan meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kemudahan berusaha, serta mendorong efisiensi administrasi perpajakan. Kebijakan dalam perpajakan dituangkan dalam kebijakan *tax holiday*, percepatan restitusi. Disisi lain, komitmen mempermudah prosedur pada bea cukai dituangkan dalam pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) Generasi 2.

Untuk *tax holiday*, Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan PPh Badan atas penghasilan dari kegiatan usaha utama sebesar 100 persen dari jumlah PPh Badan yang terutang (*fasilitas tax holiday*), dengan jangka waktu 5-20 tahun, untuk penanaman modal berkisar dari Rp500 miliar hingga diatas Rp30 triliun. Setelah jangka waktu berakhir, diberi waktu dua tahun masa transisi dengan pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen.

"Yang utama di *tax holiday*, subjeknya boleh penanaman modal baru, tidak harus Wajib Pajak baru pengurangannya 100 persen, kemudian setelah holiday ekstra 2 tahun, 50 persen diskon," papar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan.

Kebijakan restitusi dipercepat dilakukan dengan memperluas kriteria Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dalam kebijakan ini, pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat dinaikkan 900 persen, dengan nilai restitusi maksimal Rp100 juta untuk PPh Orang Pribadi non karyawan (sebelumnya Rp10 juta), nilai restitusi maksimal Rp1 miliar untuk PPh WP Badan sebelumnya Rp100 juta), dan nilai restitusi maksimal Rp1 miliar untuk PPN Pengusaha Kena Pajak (sebelumnya Rp100 juta).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Heru Pambudi mengatakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berencana mengembangkan 8 Pusat Logistik Berikat (PLB) Generasi 2. Ia menjelaskan perbedaan antara PLB generasi pertama dan generasi kedua. PLB generasi pertama hanya berfokus di logistik, bahan baku dan barang modal. Sedangkan pengembangan PLB Generasi 2 mengakomodasi kepentingan, *supporting* kepada industri di dalam negeri.

26/03

Teks
Biro KLIFoto
Biro KLI

Menkeu Apresiasi Dialog Tingkat Tinggi Indonesia - Australia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada Australia untuk berdiskusi dengan Indonesia mengenai beberapa kebijakan fiskal di Indonesia yang perlu ditingkatkan. Hal ini disampaikannya dalam forum *Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue "Better Government Budget Management in Globalized Economy"* di Aula Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (26/03). "Kami sangat ingin mendengar dari Anda semua bagaimana Indonesia dapat melangkah maju dalam menyeimbangkan anggaran yang lebih sehat antara Pemerintah Pusat dan transfer ke Pemerintah Daerah. Saya senang dengan ide yang terus mendukung hubungan yang baik dan kuat dengan Australia. Saya bisa belajar dan di waktu yang sama, kedua belah pihak juga bisa saling menarik pelajaran," ungkapnya.



27/03

Teks
Biro KLIFoto
Biro KLI

Silaturahmi Presiden dengan Pengguna Fasilitas Kepabeanaan dan Peluncuran Perizinan Online

Presiden Jokowi mengapresiasi laporan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai penyederhanaan proses perijinan dan kepeanaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada acara "Silaturahmi Presiden dengan Pengguna Fasilitas Kepabeanaan dan Peluncuran Perizinan Online" di Kawasan Berikat PT. Samick, Cileungsi, Jabar pada (27/03). Presiden mengutarakan bahwa dengan adanya perubahan teknologi yang begitu cepat, setiap orang menginginkan segala sesuatu berjalan dengan cepat pula. "Sangat kuno sekali begitu kita mengisi formulir kepeanaan, keluar dokumen bertumpuk-tumpuk yang harus kita isi. Begitu juga saat mengurus perijinan, keluar berkas yang harus kita isi pakai kertas bertumpuk-tumpuk," ungkap Presiden.

27/03

Teks
Biro KLIFoto
Biro KLI

Menkeu Menjadi Pembicara pada Acara Presidential Lecture

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam sesi *Inspiring Lecture* pada acara *Presidential Lecture* bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Rekrutmen Tahun 2017 dengan tema "Bersatu dalam Harmoni: Menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024" di Istana Olah Raga (Istora) Senayan, Jakarta, Selasa (27/03). Menkeu mengingatkan para CPNS agar meluruskan motivasi mereka untuk masuk ke dalam birokrasi Republik Indonesia, yaitu kesadaran apa yang dilakukan hanyalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. "Coba diingat bahwa ini adalah awal dari proses Anda semua untuk menuju dan menjalankan karir yang nantinya cukup panjang. Tadi, disampaikan dan Anda semua sebagai pengguna teknologi tahu betul bahwa kecepatan perubahan teknologi ini akan terus meminta kita sebagai bagian dari birokrasi Pemerintah untuk bisa merespons," pesannya.



Konferensi Pers “Sinergi Pajak dan Bea dan Cukai Permudah Layanan

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi mengadakan konferensi pers bertemakan “Sinergi Pajak dan Bea dan Cukai Permudah Layanan” di Aula Djuanda Kementerian Keuangan pada Rabu (04/04). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meluncurkan program *Joint Endorsement* untuk memudahkan para pelaku usaha mendapatkan pelayanan yang cepat. “Inti *joint endorsement* antara Bea Cukai dan Pajak adalah satu proses dua layanan. Sebelum *joint endorsement*, pengusaha atau *stakeholders* kita menerima layanan berdasarkan prosedur masing-masing. Dengan produk ini, masyarakat usaha hanya perlu masukkan satu kali input untuk 2 sistem. Termasuk proses restitusi Pajak,” jelas Dirjen Bea dan Cukai.



04/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

06/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI
Biro KLI



Kemenkeu Adakan Media Briefing Pengelolaan Utang Pemerintah

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan (Dirjen PPR) Luky Alfirman bersama Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dan Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting, menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah mengelola utang dengan hati-hati, tepat sasaran dan terencana dengan matang pada acara “*Briefing Media: Mengelola Pembiayaan Risiko agar Bermanfaat Bagi Bangsa*” di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jum’at (06/04). “Utang itu adalah satu instrumen, komponen yang ada di APBN. Kalau belanjanya lebih besar dari penerimaan, kita akan mengalami apa yang disebut dengan defisit. Defisit itu kemudian ditutupi salah satunya dengan utang. Jadi, yang perlu dipahami ketika kita melakukan utang, semua sudah ada, sudah terencana,” papar Dirjen PPR.

09/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Kuliah Umum Menteri Keuangan pada Dies Natalis FEB Undip Semarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum untuk FEB Undip di Gedung Prof. Soedarto, Undip Semarang (09/04) dalam rangka Dies Natalis FEB Undip ke-58. Pada kuliah umum bertema “*Digital Disruption: Peluang dan Tantangan Membangun Pondasi Ekonomi Indonesia 2045*”, Menkeu yakin akan muncul berbagai teknologi baru yang mampu mempengaruhi perkembangan tidak hanya pada bidang ekonomi, namun hampir ke seluruh bidang di kehidupan manusia. “Pondasi yang baik bagi Indonesia menuju 2045 dengan manusia Indonesia yang mencapai 250-300 juta. Dengan teknologi yang ada, maka Ia (Indonesia) membutuhkan empat hal. Manusiaanya yaitu pendidikan, kesehatan, karakter, *value*, integritas, agama. Kedua, kualitas dari infrastruktur. Ketiga, kualitas kelembagaan, dan keempat, kebijakan pemerintah,” ujarnya.

11/04

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI



Kemenkeu Raih Penghargaan pada Indonesia Content Marketing Award

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memenangkan penghargaan *The Best Content Marketing Implementation* untuk kategori pemerintahan pada acara *Indonesia Content Marketing Award (ICMA)* di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta pada Rabu, (11/04). “*Award* ini merupakan apresiasi bagi segenap warga Kemenkeu yang telah saling mendukung untuk menjadikan komunikasi sebagai bagian dari kebijakan. Penghargaan ini sebagai bukti bahwa Kemenkeu selalu melakukan yang terbaik dalam menentukan apa, siapa, bagaimana dan kapan sebuah konten layak dipublikasikan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. Acara ini merupakan ajang untuk mengapresiasi sekaligus mengukur strategi *content marketing* yang telah dilakukan brand dan institusi yang dianggap berhasil dalam mempraktikkan strategi *content marketing*-nya.

16/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Diskusi Panel Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah

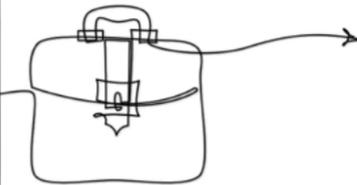
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dan sebagai moderator, Juru Bicara Presiden Johan Budi menjadi panelis pada diskusi panel Acara Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah dengan tema “*Strategi dan Tantangan Komunikasi Publik di Era Digital*” di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/04). Menkeu menekankan pentingnya strategi komunikasi publik oleh pemerintah yang humanis untuk membangun kesadaran masyarakat dan pembentukan pendapat umum dan sikap publik. “Bagaimana mengkomunikasikan (kinerja pemerintah kepada masyarakat secara efektif). Kalau kita bicara tentang hanya angka saja, orang tidak akan tahu, bahkan kalau saya menggunakan hal-hal yang sifatnya teknis, APBN menggunakan *i-Account*, *above the line*, *below the line*, defisit, pajak, itu rumit. Terus akhirnya orang tidak mau lihat,” jelasnya





Naiknya peringkat EoDB diharapkan mampu muluskan dunia usaha.

Foto
Anas nur
Huda



SINYAL BAIK DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA

Awal 2018, Indonesia mencatat prestasi menggembirakan dengan naiknya peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Tahun 2017. Di sisi lain, tantangan pemerintah justru semakin besar dengan menjadikan seluruh wilayah Indonesia menjadi ramah bagi investor.

Laporan tahunan “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs” yang dirilis oleh Grup Bank Dunia, menggambarkan iklim kemudahan berusaha dari 190 negara di dunia. Laporan tersebut menginvestigasi regulasi-regulasi di suatu negara yang berpengaruh dalam kemudahan atau hambatan dalam berusaha atau berbisnis.

Survei tahunan EoDB dilakukan dengan menghimpun data melalui penyebaran kuesioner survei kepada para responden. Responden tersebut mewakili para praktisi dan pelaku usaha, seperti notaris, konsultan hukum, konsultan pajak, *freight forwarder*, dan sebagainya.

Setiap tahunnya, Grup Bank Dunia juga melakukan komunikasi dengan pemerintah negara-negara yang disurvei. Survei ini ditujukan untuk memperoleh masukan mengenai reformasi yang telah terselenggara dan masukan terhadap temuan sementara survei EoDB. Masukan dari pemerintah kemudian akan diverifikasi kepada responden yang mewakili para praktisi dan pelaku usaha.

Survei EoDB ini meliputi 10 indikator. Indikator inilah yang mencerminkan perilaku investor dalam menghadapi regulasi yang ada. Indikator dengan peringkat cukup baik yang telah diraih Indonesia antara lain kemudahan memulai usaha, kemudahan mengurus perizinan untuk mendirikan dan menggunakan bangunan komersial, kemudian melakukan jual beli dan balik kepemilikan tanah dan bangunan, kemudahan melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dan iuran wajib, kemudahan melakukan kegiatan ekspor impor, serta kemudahan penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan sederhana.

Pada EoDB 2018, Indonesia berhasil naik peringkat di posisi 72. Sedangkan pada EoDB 2017 Indonesia berada di posisi 91, dan pada EoDB 2016 di posisi 106. Meningkatnya peringkat EoDB dalam dua tahun terakhir ini patut diapresiasi. Sesuai dengan Nawacita, pemerintah terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien. Salah satu upayanya yaitu melalui percepatan kemudahan berusaha.

Lebih lanjut, Indonesia juga telah berhasil mengalami perbaikan paling signifikan di ASEAN dalam kurun waktu 2017 dan 2018. Dengan naiknya peringkat Indonesia pada EoDB 2017 sebanyak 15 point dan pada EoDB 2018 sebanyak 19 poin, total Indonesia telah naik sebanyak 34 poin dalam kurun dua tahun terakhir. Atas pencapaian ini, Indonesia masuk dalam kategori Top Reformer dalam EoDB

2017. Top Reformer adalah 10 negara terbaik di dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir.

Komitmen percepatan kemudahan berusaha

Di sisi lain, payung hukum untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia telah ditetapkan. Pada tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, kebijakan ini disusun untuk mengatasi hambatan dalam proses perizinan dan memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (*single submission*).

Keseluruhan kebijakan ini merupakan salah satu rangkaian Paket Kebijakan Ekonomi. Dalam percepatan kemudahan berusaha, kebijakan yang ditujukan agar Indonesia menjadi negara layak investasi ini terangkum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Melalui payung hukum ini, pemerintah berusaha memperbaiki indikator-indikator dalam EoDB yang masih buruk.

Percepatan kemudahan berusaha ini memang tak semata-mata demi mengejar peringkat EoDB. Beberapa alasan yang mendasari percepatan kebijakan ini yaitu investasi dunia terhadap Indonesia masih rendah (1,97 persen) dari rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar USD1.417,8 miliar. Kemudian, capaian target rasio investasi sebesar 32,7 persen (2012-2016) yaitu di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 38,9 persen pada tahun 2019. Di sisi lain, ketimpangan investasi

antara di pulau Jawa dengan luar Jawa masih sangat besar, yaitu di atas 50 persen.

Maka, pemerintah pun terus menggali akar permasalahan kinerja realisasi investasi yang belum sesuai target. Beberapa penyebabnya antara lain layanan perizinan yang tidak terintegrasi, berurutan, dan belum seluruhnya dilayani di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta belum sepenuhnya menggunakan sistem *online*. Mirisnya, praktik *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) juga belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah. Paradigma birokrasi masih sebagai 'pemberi izin' dan belum 'melayani.'

"Meningkatkan peringkat Indonesia dalam laporan 'Doing Business' memberikan sinyal baik kepada calon investor yang akan masuk ke Indonesia," ujar Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso. Melalui capaian tersebut, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan iklim kebijakan yang kondusif dan berkepastian hukum bagi pelaku usaha.

Simplifikasi Regulasi

Dalam mendukung percepatan EoDB, simplifikasi regulasi memegang peranan yang cukup penting. Tak bisa dipungkiri, kondisi regulasi di Indonesia masih tumpang tindih. Dalam hal kemudahan berusaha, tentunya hal ini sangat menghambat masuknya calon investor ke Indonesia.

"Sebagai contoh, Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya sudah meniadakan surat keterangan domisili perusahaan dari daftar persyaratan perizinan dalam rangka pendirian usaha. Namun ternyata ditemukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak masih mensyaratkan surat keterangan domisili perusahaan untuk



Menciptakan iklim usaha yang baik mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Foto Agus Tri Hananto

permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak," jelas Bambang.

Adanya inefisiensi regulasi antarkementerian/lembaga ini akhirnya mendasari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menginstruksikan pemangkasan regulasi. Program Simplifikasi Regulasi di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini. Hingga 31 Maret 2018, terdapat 1472 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dipangkas dari total 2407 PMK yang terbit dalam kurun waktu 2006-2015. Total pemangkasan regulasi sebesar 61 persen.

Jenis-jenis kegiatan dalam simplifikasi regulasi antara lain inventarisasi dan identifikasi regulasi yang terkait perizinan dan investasi, serta analisis regulasi yang akan disimplifikasi. Sedangkan kriteria regulasi yang akan disimplifikasi yaitu regulasi yang menghambat kegiatan ekonomi atau investasi, inkonsisten dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau sederhana, multitafsir

dan/atau mengatur ketentuan yang sama namun objeknya berbeda.

Pemerataan iklim berusaha

Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengapresiasi capaian peringkat Indonesia yang naik 19 poin pada EoDB 2018. Di sisi lain, Faisal memberi catatan bahwa peringkat EoDB jangan dijadikan fokus utama. Peningkatan kemudahan berusaha yang sebenarnya yaitu dengan memberikan iklim yang representatif kepada para investor tidak hanya di Jakarta dan Surabaya, namun juga merata di seluruh Indonesia.

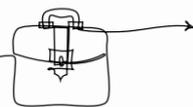
Faisal menilai, ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih cukup tinggi, terlebih antara pulau Jawa dengan luar Jawa. Di sisi lain, otonomi daerah juga berdampak pada faktor politik yang berbeda antarwilayah. Setiap daerah kini memiliki otonomi untuk mengurus ekonominya sendiri. Maka, kondisi kemudahan berusaha di tiap daerah sangat bergantung pada kebijakan pimpinan daerah.

"Permasalahan utama yang harus diselesaikan pemerintah adalah konsistensi kebijakan pusat dan daerah," tegas Faisal. Hambatan ini cukup sering ditemukan di lapangan. Menurut Faisal, para pengusaha tidak hanya mengeluhkan masalah perizinan di daerah, namun juga masalah kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah.

Kemudian, hal lain yang juga menjadi permasalahan terkait kemudahan berusaha yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda tiap daerah, sehingga penerimaan daerah dari sektor perizinan menjadi penting bagi daerah yang memiliki PAD rendah. "Dalam kasus ini, perlu adanya peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan asistensi secara berkala ke pemerintah daerah demi iklim investasi yang semakin baik di daerah," jelas Faisal.

Terkait simplifikasi regulasi di Kementerian Keuangan, Faisal mengapresiasi kebijakan ini untuk kemudahan iklim berusaha di Indonesia. Namun perlu menjadi catatan, peraturan yang perlu dipangkas tidak hanya di tingkat pusat saja, namun juga di tingkat daerah. Menurutnya, tak jarang kondisi regulasi di daerah lebih rumit daripada di tingkat pusat. Sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah akan mendukung iklim berusaha yang ramah bagi investor. Pemerataan iklim berusaha di seluruh Indonesia ini tentu yang menjadi prioritas utama pemerintah, melebihi target peringkat EoDB.

Teks Pradany Hayyu



KABAR GEMBIRA INVESTASI DI INDONESIA



Presiden Jokowi menargetkan untuk melakukan pemangkasan terhadap 50 persen dari 42 ribu regulasi di seluruh Kementerian/Lembaga. Hal ini dilakukan salah satunya agar ada dampak baik pada perekonomian Indonesia, agar para pengusaha dan investor lebih mudah menjalankan usahanya. Bank Dunia membuat perbandingan regulasi kemudahan berusaha di 190 negara, termasuk Indonesia, yang disebut dengan Ease of Doing Business (EoDB). Saat ini, Indonesia berada di peringkat 72.

POSISI INDONESIA PADA 10 INDIKATOR EODB

Indikator	2018	2017	Perubahan
Memulai Usaha	144	151	▲ 7
Perizinan Terkait Mendirikan Bangunan	108	116	▲ 8
Penyambungan Listrik	38	49	▲ 11
Pendaftaran Properti	106	118	▲ 12
Akses Perkreditan	55	62	▲ 7
Perlindungan Terhadap Investor Minoritas	43	70	▲ 27
Pembayaran Pajak	114	104	▼ 10
Perdagangan Lintas Negara	112	108	▼ 4
Penegakan Kontrak			
Penyelesaian Perkara Kepailitan	145	166	▲ 21
	38	76	▲ 38

KEMENTERIAN KEUANGAN DUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

- 1. Penyederhaanaan mekanisme pembuatan NPWP.** (pembuatan NPWP cukup melampirkan surat pernyataan atas kegiatan usaha tanpa harus membuat Surat Keterangan Domisi Usaha [SKDU] dari Pemda)
- 2. PERALIHAN PELAYANAN INVESTASI** dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, Kabupaten, Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas, maupun PTSP Kawasan Ekonomi Khusus.
- 3. Kemudahan dan percepatan restitusi pajak (tax refund) menjadi 1-3 BULAN.**
- 4. Peningkatan layanan secara ONLINE**, seperti:
 - DJP: memberikan kemudahan pelaporan SPT melalui ragam Application Service Provider (ASP)
 - DJBC: membuka layanan Go-Fast DJBC mempercepat layanan perizinan Kepabeanaan dan Cukai (PMK Nomor 29/PMK.04/2018)
- 5. PLB generasi II**, dari yang sebelumnya hanya satu PLB, kini menjadi **DELAPAN PLB**
- 6. DEREGULASI** untuk regulasi yang terbit antara tahun 2006 dan 2015. Dari 2.407 PMK yang ada, 1.472 PMK telah di pangkas. Sampai dengan Maret 2018, PMK yang dimiliki hanya berjumlah 935 PMK.
- 7. Joint endorsement** antara DJP dan DJBC untuk layanan **FAKTUR PAJAK** dan layanan pemberitahuan pabean **FREE TRADE ZONE.**
- 8. Perubahan regulasi TAX HOLIDAY** (PMK Nomor 35 Tahun 2018) untuk pengurangan PPh 10-100% dari PPh yang terutang.

Sumber: Kemenkeu

NILAI INVESTASI PERIODE 2016-2017

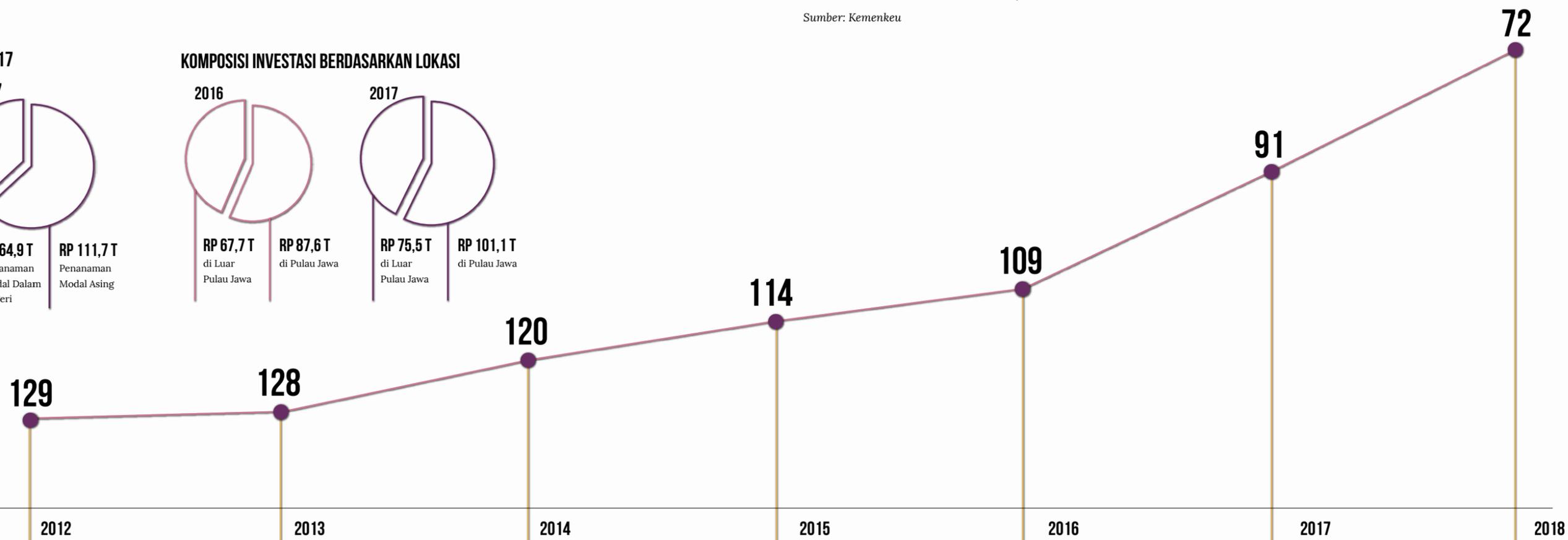


KOMPOSISI INVESTASI BERDASARKAN LOKASI



Sumber: BKPM

PERINGKAT EASE OF DOING BUSINESS (EODB) INDONESIA SETIAP TAHUNNYA.



DEREGULASI DAN SIMPLIFIKASI DORONG KEMUDAHAN INVESTASI



Awal tahun 2018 lalu, Bank Dunia secara resmi merilis peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) negara-negara di dunia untuk tahun 2017. Peringkat tersebut menjadi salah satu indikator atau indeks yang diperoleh dari berbagai aspek dan memiliki pengaruh terhadap keputusan dari para pelaku usaha dalam berinvestasi pada suatu negara. Peringkat kemudahan berusaha yang semakin baik mencerminkan semakin efisiensi pasar dari negara tersebut bekerja dan iklim investasinya pun dianggap semakin baik. Dengan kata lain,

dapat dikatakan bahwa peringkat kemudahan berusaha telah mewakili beberapa faktor yang menjadi dorongan bagi pihak swasta untuk melakukan usaha atau investasi di suatu negara.

Indonesia sendiri mengalami tren yang positif dalam peringkat tersebut. Tercatat selama kurun waktu enam tahun terakhir, peringkat Indonesia selalu mengalami kenaikan. Tahun 2012, peringkat EoDB Indonesia tercatat di posisi 129 dan naik ke posisi terakhir di peringkat 72 pada tahun 2018. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintahan untuk selalu memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Iklim investasi yang baik tak hanya akan

mendorong neraca perdagangan melalui kenaikan ekspor, namun juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mendukung hal itu, Presiden Jokowi sendiri telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada akhir tahun lalu. Dalam Perpres tersebut, Presiden mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Nasional, Kementerian/Lembaga, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung percepatan pembentukan iklim investasi yang baik. Selain itu, Presiden juga mengamanatkan reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan di pemerintah pusat maupun daerah agar selaras dan tidak tumpang tindih. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau *online single submission*.

“Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat, dengan sistem data

Simplifikasi proses bisnis fasilitas layanan kepabeanan meningkatkan kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha.

Foto Arief Kuswanadji

yang terpadu, terintegrasi sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi,” jelas Presiden dalam Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada 18 April 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Deregulasi dan simplifikasi proses bisnis

Sementara itu, dari sisi pelayanan kepabeanan dan cukai serta perpajakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah melakukan berbagai macam kebijakan yang mendukung percepatan pelaksanaan berusaha. Tercatat selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2015, Kemenkeu

telah berhasil melakukan deregulasi sebanyak 1.474 peraturan atau sekitar 61,2 persen dari total peraturan yang berlaku. Sementara itu, pada tahun 2016 terdapat 40 Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan (PMK/KMK) yang dipangkas dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 88 regulasi yang dipangkas. Selain deregulasi peraturan, Kemenkeu juga telah menyusun 25 PMK untuk simplifikasi proses bisnis di bawah kewenangan Kemenkeu. Pada tahun ini sendiri, Menteri Keuangan telah menandatangani PMK terbaru Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha untuk mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 91 tahun 2017 pada tanggal 26 Maret 2018.

Menjelaskan dampak deregulasi dan simplifikasi tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Adriyanto, mengungkapkan bahwa realisasi investasi langsung di Indonesia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 13,1 persen *year on year*, dimana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat mencapai Rp262,3 triliun atau tumbuh sebesar 21,3 persen *year on year*. Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat mencapai Rp430,6 triliun atau tumbuh sebesar 8,6 persen *year on year*. Terkait dengan PMA, Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa pertumbuhan realisasi

PMA Indonesia pada tahun 2017 disebabkan salah satunya oleh reformasi regulasi investasi yang baik. Dalam laporan tersebut, Indonesia juga dinilai sebagai salah satu tujuan investasi potensial nomor 4 setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India bagi para perusahaan multinasional.

Kemudahan layanan perpajakan

Setidaknya dari sebelas indikator EoDB yang digunakan Bank Dunia, Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki. Staf Ahli Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, menjelaskan bahwa reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sebenarnya sejak lama telah dilakukan. Namun, saat ini, Kemenkeu melalui DJP tengah fokus pada pemberian kemudahan Wajib Pajak (WP) mulai dari proses pendaftaran untuk *starting business*, pembayaran, pelaporan hingga pemenuhan hak dan kewajiban WP.

Dari sisi pendaftaran WP, DJP telah melakukan terobosan dengan mempermudah pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menggunakan fasilitas database Kartu Tanda Penduduk, sehingga sudah tidak lagi memerlukan Surat Keterangan Domisili Usaha dari pemerintah daerah. Selain itu, bagi pengusaha yang ingin mengurus Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) juga dipermudah dengan pemberian kartu lebih awal, baru setelahnya diverifikasi fisik.

Lebih jauh lagi, Suryo juga menjelaskan dalam rangka mendukung industri *start up* dan inovasi, DJP juga memberikan kemudahan penggunaan fasilitas *virtual office* untuk pendaftaran NPWP maupun NPPKP. Pendaftaran pun saat ini dapat dilakukan di tempat-tempat publik, seperti Mal Pelayanan Publik, Tempat Pelayanan Satu Atap yang dibentuk untuk perizinan misalnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal, bahkan dapat dilakukan pula di tempat beberapa pihak yang ditunjuk oleh DJP, seperti notaris. Tak ketinggalan, pendaftaran secara *online* pun dapat dilakukan melalui *e-registration* NPWP.

Terkait dengan pembayaran dan pelaporan, DJP juga telah menggunakan *platform online* yang telah terkoneksi dengan sistem perbankan maupun sistem kas negara. Pelaporan pun dipermudah dengan menggunakan fitur *e-filing*. Di sisi lain, DJP juga memberikan kemudahan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui skema restitusi yang dipercepat dari sebelumnya rata-rata 47,7 minggu menjadi rata-rata 15 hari sampai dengan tiga bulan. Kemudahan itu diberikan dengan menyederhanakan atau mempercepat pemberian restitusi yang dilakukan tanpa pemeriksaan, melainkan dengan penelitian yang sederhana.

Kemudahan restitusi ini diberikan pada WP dengan kriteria tertentu. Pertama, WP patuh dengan kriteria sesuai Pasal 17C Undang-Undang KUP. “WP Patuh itu WP yang memenuhi kriteria menurut Undang-Undang, tiga tahun diperiksa kantor akuntan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, tidak punya tunggakan pajak, tidak sedang dipidana dalam lima tahun terakhir, dan tepat waktu dalam menyampaikan SPT,” jelas Suryo.

Kedua adalah WP yang memenuhi persyaratan tertentu dengan nilai restitusi kecil, yakni WP orang pribadi dengan tanpa batasan nilai restitusi Pajak Penghasilan (PPh), WP pengusaha dan profesi dengan nilai maksimal restitusi PPh Rp100 juta, WP Badan dengan nilai restitusi PPh maksimal Rp1 Miliar, dan PKP dengan nilai restitusi PPN maksimal Rp1 Miliar.

Terakhir, PKP berisiko rendah yang terdiri dari perusahaan terbuka yang *go public* di Indonesia, BUMN/BUMD, Mitra Utama Kepabebean (MITA), Authorized Economic Operator (AEO), pabrikan/

produsen lainnya, PKP dengan restitusi maksimal Rp1 Miliar, kegiatan ekspor, transaksi kepada pemungut PPN dan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, seperti di Kawasan Berikat. Selain itu, diberikan juga kepastian hukum dalam insentif fiskal berupa *tax holiday* dan *tax allowance*.

Mendorong ekspor dan investasi

Dari sisi kebijakan fasilitas kepabebean juga ikut berperan dalam mendorong kemudahan arus barang investasi masuk dan keluar. Untuk itu, Direktur Fasilitas Kepabebean, Robi Toni, menjelaskan bahwa melalui PMK Nomor 28/PMK.04/2018 tentang perubahan PMK Nomor 272 tahun 2015 tentang Pusat Logistik Berikat dan PMK Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabebean dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga melakukan upaya perbaikan pelayanan.

Dari PMK Nomor 28 tahun 2018 sendiri, DJBC melakukan peningkatan pelayanan Tempat Penimbunan Berikat yang dalam hal ini adalah Pusat Logistik Berikat (PLB) generasi II. “Generasi II ini kita kembangkan menjadi 8 bentuknya, tidak hanya industri besar, ada industri kecil dan menengah, kemudian ada PLB *Floating Storage*. Termasuk nanti ada juga PLB Barang Jadi, PLB *e-commerce*, PLB Bahan Pokok, PLB Hub Cargo Udara, dan PLB Ekspor Barang Komoditas. Jadi yang tadinya *fully* untuk

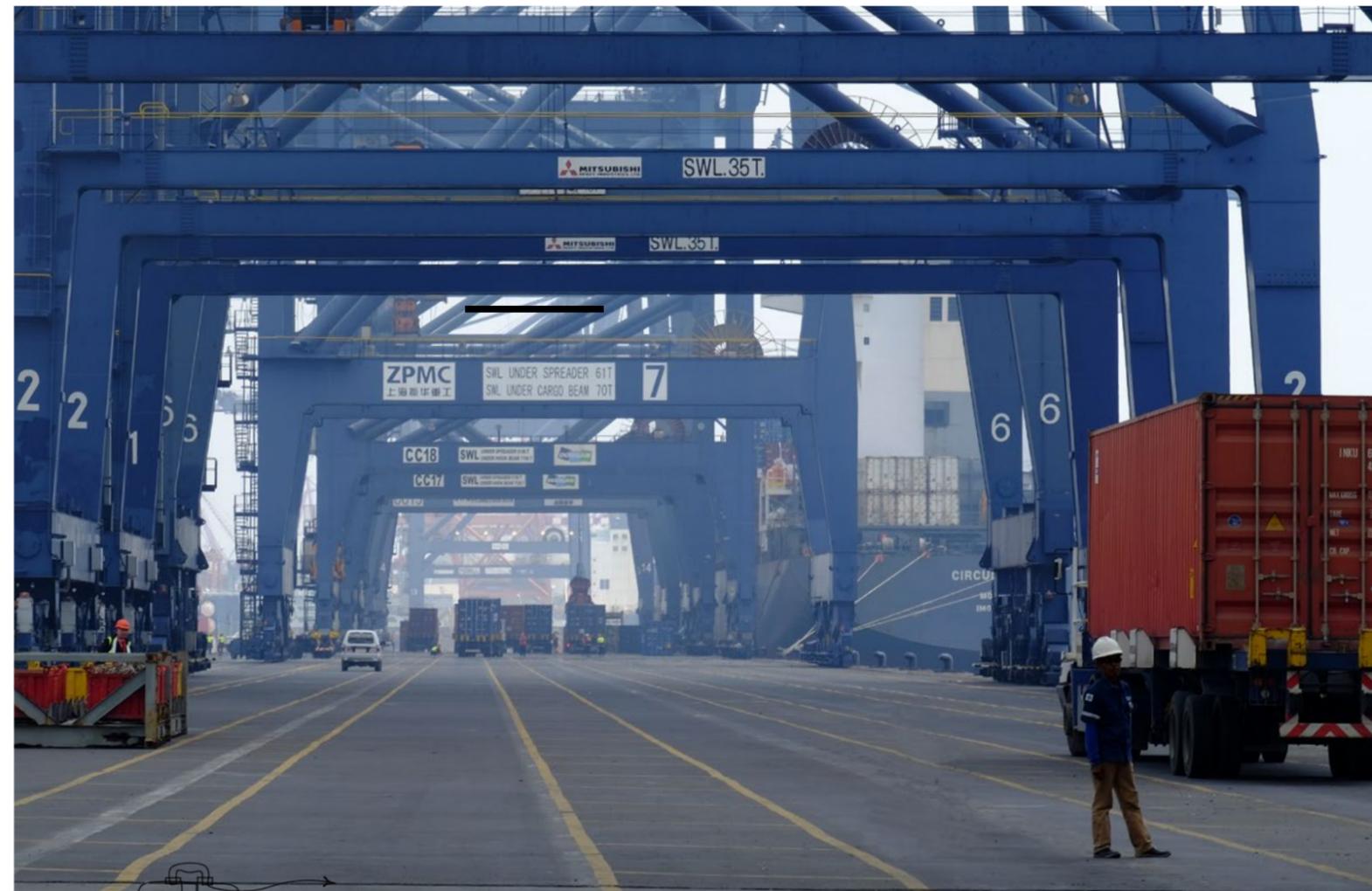
kepentingan industri, jadi sekarang kita kembangkan fungsinya untuk juga *support* barang-barang kebutuhan yang lain,” jelas Robi.

Dengan semakin berkembangnya PLB, Robi menjelaskan industri tidak hanya akan mampu mengurangi biaya logistik karena biaya penimbunannya lebih murah, namun juga mampu mempercepat *supply chain* karena barangnya tersedia di wilayah Indonesia dan lebih dekat ke daerah industri.

Di sisi lain, simplifikasi proses bisnis di DJBC juga telah dilakukan melalui PMK Nomor 29 tahun 2018 yang berimplikasi pada pengurangan izin prinsip Tempat Penimbunan Berikat dari 10 hari kerja menjadi 1 jam izin secara *online*, proses registrasi kepabebean dari 5 hari kerja menjadi 3 jam secara *online*, izin prinsip Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari 30 hari kerja menjadi 1 jam, perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang sebelumnya 30 hari menjadi 3 hari, serta izin transaksional Kawasan Berikat akan disederhanakan dari 45 perizinan menjadi 3 izin secara *online*.

“Dari izin 45 tadi, izin operasional di kawasan berikat kita sisakan hanya 3 yang benar-benar memang diperlukan. Yang pertama adalah izin untuk pengeluaran sementara yang nanti akan masuk lagi, kemudian izin menerima pekerjaan subkontrak dari lokal ke Kawasan Berikat, serta satu lagi adalah izin pengeluaran bahan baku ke lokal,” ujar Robi.

Teks Abdul Aziz



TANGGAPAN DUNIA USAHA TERHADAP EoDB

Dalam tiga tahun terakhir, peringkat kemudahan usaha Indonesia (EoDB) naik signifikan. Dari peringkat 106 pada 2016, meningkat ke posisi 91 pada 2017, dan ke posisi 72 di tahun 2018. Salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian oleh Kelompok Bank Dunia tersebut adalah pemangkasan regulasi.

Adriyanto, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro mengatakan kinerja pemerintah saat ini bukan lagi dilihat dari banyaknya peraturan baru yang dibuat, namun dari seberapa banyak peraturan yang dihilangkan, termasuk di bidang investasi.

Kegiatan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Foto Anas Nur Huda.

Kenaikan Investasi

Adriyanto memaparkan, pada tahun 2017, realisasi investasi langsung di Indonesia tumbuh sebesar 13,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp262,3 Triliun atau tumbuh 21,3 persen. Sementara, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp430,6 Triliun atau tumbuh 8,6 persen.

Bank Dunia dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan pertumbuhan realisasi PMA Indonesia pada 2017 salah satunya disebabkan oleh reformasi regulasi investasi. "Dalam laporan tersebut, Indonesia dinilai sebagai tujuan investasi potensial nomor 4 setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India bagi para perusahaan multinasional," ujar Adriyanto.

Dijelaskan Adriyanto lebih lanjut, saat ini setiap negara terus berupaya untuk meningkatkan daya saing melalui berbagai hal, salah satunya simplifikasi peraturan. Tahun ini, Indonesia bukan hanya mencatatkan kenaikan peringkat EoDB dari Bank Dunia, tetapi juga naiknya peringkat Indonesia dalam *global competitiveness*.

Kedua laporan tersebut menggunakan metodologi survei kepada para pelaku usaha. "Upaya untuk mewujudkan iklim berusaha yang kondusif tersebut disambut baik oleh dunia usaha. Namun, peningkatan tetap terus dilakukan mengingat negara tetangga juga melakukan hal serupa," kata Adriyanto.

Kondisi di Lapangan

Hariyadi Sukamdani, Ketua Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan apresiasinya atas terbitnya Perpres Percepatan Pelaksanaan berusaha. Dunia usaha berharap regulasi ini segera terimplementasi agar dapat dimanfaatkan dan memberi kepastian hukum kepada investor.

Menurut Hariyadi, pemberian *investment grade* dan EoDB bisa mempengaruhi persepsi global sehingga lebih yakin untuk berinvestasi ke Indonesia. "Selain itu, hal ini juga akan membantu pengusaha-pengusaha Indonesia dalam meraih pendanaan khususnya dari luar negeri sehingga mereka bisa lebih berkembang," kata Hariyadi.

Namun, Apindo juga memandang status tersebut bukan jaminan investasi yang masuk akan meningkat besar. Menurut Hariyadi, bagi investor yang terpenting

adalah adalah pembenahan kendala perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan birokrasi karena menyangkut kepastian hukum.

Pemerintah juga perlu berhati-hati dalam kebijakan makro seperti pengendalian inflasi, pengelolaan, penyesuaian APBN, dan menjaga rasio utang. Ini semua untuk menjaga kepercayaan investor terhadap indikator perekonomian Indonesia," ujar Hariyadi.

Hariyadi menambahkan, dunia usaha masih melihat adanya aturan yang tidak sinkron dengan regulasi pendukungnya. Ia mencontohkan, dalam UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebut jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun ke depan.

Sementara, dalam UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, HGB dapat diberikan dan diperpanjang di muka 50 tahun serta diperbaharui untuk 30 tahun. Aturan yang berbeda ini menimbulkan kebingungan ketika pengusaha berkonsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ketika HGB akan berakhir," ungkap Hariyadi.

Ruang Depan

Meski deregulasi telah dilakukan, Adriyanto mengakui bahwa para pelaku usaha masih mengeluhkan lambat dan rumitnya birokrasi pengurusan izin. Sebab itu, kini perombakan besar-besaran tengah dilakukan untuk membuat semuanya lebih mudah dan sederhana. "Walau dipermudah, investor tetap wajib memenuhi izin-izin dasar berusaha seperti izin mengurus lingkungan, izin keamanan, dan izin bangunan," jelas Adriyanto.

Adriyanto menambahkan, penyediaan insentif fiskal juga diberikan untuk menarik minat swasta berinvestasi di sektor tertentu. Pada tahun 2018 Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif *tax holiday* bagi investor yang memperluas sektor sasaran insentif dari 8 menjadi 17 sektor. Selain itu, saat ini juga sedang disusun peraturan pengurangan tarif pajak penghasilan bagi UKM dari 1 persen menjadi 0.5 persen, di samping usulan penguatan kebijakan *tax allowance*.

Teks Irma Kesuma



Bambang Adi Winarso, Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Foto
Anas Nur Huda

EoDB UNTUK PERTUMBUHAN INVESTASI

Pencapaian Indonesia meraih peringkat ke-72 dari 190 negara di dunia pada survei Ease of Doing Business oleh Grup Bank Dunia patut diapresiasi. Di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk terus meningkatkan peringkat EoDB pada tahun-tahun berikutnya dan menjaga iklim berusaha di Indonesia semakin baik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya pemerintah dalam menggenjot investasi di Indonesia, simak wawancara Media Keuangan dengan Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso, berikut ini.

Apa pengertian Ease of Doing Business (EoDB)?

EoDB merupakan pemeringkatan kemudahan berusaha yang dipublikasikan setiap tahun oleh Grup Bank Dunia. Dalam pemeringkatan ini, penilaian dilakukan berdasarkan kemudahan di 10 area yang merepresentasikan siklus hidup yang dilalui oleh usaha kecil dan menengah domestik di negara yang disurvei. Negara-negara yang berada pada kedudukan terdepan dalam peringkat EoDB adalah negara-negara yang memiliki kinerja terbaik di 10 area yang disurvei dan selaras dengan praktik terpuji internasional.

Indonesia berhasil meraih peringkat dalam hal berikut: kemudahan mendirikan usaha, kemudahan mengurus perizinan, kemudahan jual beli dan balik nama kepemilikan tanah atau bangunan, kemudahan melakukan pelaporan dan pembayaran pajak serta iuran wajib, kemudahan melakukan kegiatan ekspor impor, dan kemudahan penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan sederhana.

Bagaimana Kemenko Bidang Perekonomian memandang pencapaian Indonesia yang berhasil meraih peringkat ke-72 dalam EoDB 2018?

Capaian baik tersebut masih harus dilanjutkan dengan terus melakukan langkah perbaikan. Perbaikan tersebut melalui perubahan kebijakan yang melandasi terselenggaranya reformasi struktural, maupun penyederhanaan prosedur, persyaratan, dan biaya. Maka, kinerja kemudahan berusaha Indonesia di semua indikator yang diukur oleh survei EoDB secara bersama dapat semakin selaras dengan praktik terpuji internasional. Lebih penting lagi, prestasi Indonesia dalam survei EoDB ini dapat secara efektif memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan usaha di Indonesia.

Bagaimana koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian dengan kementerian lain dalam meningkatkan peringkat EoDB di Indonesia?

Kemenko Bidang Perekonomian bersama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian dengan instansi yang terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah terkait. Koordinasi dilakukan dalam rangka penyusunan rencana aksi dan pemantauan pelaksanaannya. Koordinasi ini guna memastikan bahwa sasaran perbaikan kinerja kemudahan berusaha

di Indonesia, sebagaimana diukur oleh survei tahunan EoDB, dapat tercapai.

Koordinasi lintas instansi oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan BKPM juga dilakukan secara intensif dengan kementerian dan instansi terkait. Selain itu kami juga melibatkan Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan koordinasi penyusunan rencana aksi dan monitoring implementasi reformasi EoDB.

Dalam peningkatan iklim berusaha di Indonesia, upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah?

Prioritas upaya pemerintah yaitu melakukan reformasi kebijakan serta peningkatan kinerja dan efisiensi layanan publik. Peningkatan kinerja ini terutama di indikator-indikator dimana Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain atau topik-topik yang masih menduduki peringkat di atas 100 dalam hal kemudahan berusaha. Bukan berarti bahwa indikator-indikator dimana kinerja Indonesia sudah cukup baik tidak menjadi fokus perbaikan.

Upaya untuk mencapai sasaran kinerja antara lain memulai proses reformasi kebijakan struktural yang membutuhkan Undang-Undang, merancang dan melaksanakan reformasi kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik (penyederhanaan prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya), konsultasi dengan para pelaku usaha mengenai perbaikan ketentuan yang sudah ada, serta

monitoring berkala atas langkah-langkah perbaikan tersebut.

Sejauh ini, apa tantangan dalam memperbaiki iklim berusaha di Indonesia?

Dalam proses identifikasi indikator-indikator perbaikan dalam berbagai topik, ditemukan bahwa salah satu penghambat proses penyederhanaan persyaratan perizinan adalah tumpang tindihnya aturan perizinan. Pada dasarnya, hal ini dapat diatasi dengan melakukan *data sharing* antara instansi-instansi teknis. Sebagai bagian dari reformasi EoDB, persyaratan surat keterangan domisili perusahaan telah ditiadakan dengan hanya membutuhkan dua persyaratan. Pertama, surat pernyataan domisili dari pemohon. Kedua, mengoptimalkan proses validasi Nomor Induk Kependudukan dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri secara *online*.

Selain itu, Kemenko Bidang Perekonomian juga mendorong layanan melalui sistem *online* atau sepenuhnya secara elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan meminimalisir interaksi pemohon dengan instansi-instansi teknis terkait.

Kami juga mendorong keberhasilan di Jakarta dan Surabaya (sebagai lokasi survei EoDB) ke daerah-daerah lain di Indonesia untuk memastikan bahwa peningkatan layanan dapat diselenggarakan secara seragam dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Teks Pradany Hayyu



Masuk Tol Aman dan Nyaman

Peningkatan konektivitas sangat dibutuhkan untuk menurunkan biaya logistik barang dan jasa, serta pemerataan kesejahteraan. Salah satunya melalui penambahan ruas jalan tol. Setelah dibangun, jalan-jalan ini perlu dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menceritakan kepada Media Keuangan bagaimana cara BPJT mengelola jalan tol agar nyaman bagi pengguna sekaligus memberikan keuntungan bagi pengelola.

Saat ini panjang jalan tol yang beroperasi mencapai lebih dari 1.100 km dengan tambahan 346 km dalam 3 tahun terakhir.

Foto
Cahyo Afif Nugroho

Seperti apakah Anda melihat kondisi jalan tol di Indonesia?

Jalan tol di Indonesia memasuki masa perkembangan yang tinggi. Saat ini panjang jalan tol yang beroperasi mencapai lebih dari 1.100 km dengan tambahan 346 km dalam 3 tahun terakhir. Secara grafis, pertumbuhan jalan tol sudah meninggalkan pertumbuhan yang landai dengan rata-rata 20 km/tahun. Saat ini pertumbuhan jalan tol meningkat lebih dari 5 kali pertumbuhan dalam kurun waktu sebelumnya menjadi 115 km/tahun.

Hingga akhir tahun 2019, akan beroperasi jalan tol sepanjang 2.500km yang artinya angka pertumbuhan mencapai 400 km/tahun. Walaupun masih berada di bawah Malaysia (2000 km), Korea Selatan (5000 km), apalagi Tiongkok yang memiliki jalan tol 65.000 km, setidaknya apabila momentum pertumbuhannya tetap dijaga, kita akan dapat mengejar ketertinggalan.

Dari sisi kualitas, kita sedang berupaya memenuhi standar pelayanan minimum yang lebih terukur. Kondisi jalan tol harus dijaga tetap handal dan tidak mudah rusak akibat hujan. Beban berlebih yang selama ini menyebabkan kerusakan dini juga harus dikendalikan sehingga kondisi jalan tol tetap baik sepanjang waktu.

Dari sisi pengoperasian, Indonesia telah menerapkan pembayaran menggunakan uang elektronik secara penuh sejak 31 Oktober 2017. Hal ini dicapai dalam waktu kurang dari 7 bulan, sementara Malaysia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai tahap tersebut.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna, saat ini sedang dirintis penerapan transaksi nir sentuh atau *multi lane free flow* sebagaimana telah diterapkan di banyak Negara seperti Taiwan, Qatar, Australia, Hongaria dan banyak negara eropa lainnya.

Lebih dari 70 persen jalan tol yang beroperasi saat ini ada di Pulau Jawa. Mengapa?

Sebagian besar tol yang telah beroperasi berada di Pulau Jawa karena 50 persen perekonomian ada di Jawa. Selain itu, kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mengharuskan jalan tol yang layak secara finansial agar menarik bagi swasta untuk berinvestasi. Hal ini tentu membutuhkan volume lalu lintas yang tinggi di daerah yang sudah berkembang.

Sementara itu, dana negara (APBN) bisa dioptimalkan untuk membangun jalan lintas Papua, perbatasan Kalimantan dan lintas batas negara. Selain menciptakan keadilan antar wilayah, konsep ini juga bisa menciptakan keadilan antar generasi dan antar strata ekonomi.

Kedepannya, pembangunan jalan tol yang terintegrasi dan terkoneksi dengan semua pusat kegiatan utama diharapkan dapat menyatukan nusantara, mendorong pembangunan wilayah, sekaligus meningkatkan daya saing. Dengan demikian, jalan tol tidak hanya hadir di Jawa dan Sumatera saja, tetapi juga di Kalimantan dan Sulawesi sebagai pulau yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Bagaimana cara memantau kepadatan dan kejadian seperti kecelakaan, kendaraan mogok, atau barang jatuh sehingga dapat mendistribusikan bantuan dengan cepat?

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menggunakan CCTV untuk memantau kondisi jalan sepanjang waktu. Selain itu terdapat sistem manajemen lalu lintas radio untuk memonitor lalu lintas secara *real time*.

Kemudian, Peraturan Menteri PU No.16 tahun 2014 mengatur pemenuhan aspek mobilitas. Indikatornya adalah kecepatan penanganan hambatan lalu lintas, kecepatan penanganan patroli jalan raya, serta kecepatan penanganan kendaraan derek. Observasi patroli

adalah 30 menit per siklus pengamatan. Dengan parameter tersebut diharapkan penanganan hambatan lalu lintas dapat dilakukan dengan cepat.

Saat ini sedang dikembangkan peta jalan Sistem Transportasi Cerdas yang mencakup setidaknya sistem informasi lalu lintas, sistem transaksi elektronik, pengendalian kendaraan berat, sentral komunikasi terpusat.

Seperti apa penentuan tarif yang adil bagi pengguna dan pengelola?

Sesuai UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tarif tol ditentukan berdasarkan kemampuan bayar pengguna, besar biaya operasional, dan pengembalian investasi. Artinya tarif tol dibuat sedemikian rupa agar terjangkau, memberikan manfaat bagi pengguna, dan menjamin pengembalian investasi badan usaha. Selain itu, sebagai jalan alternatif, jalan tol menjamin pengguna untuk mempunyai pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jalan tol.

Seperti apa bentuk pengaturan dan pengawasan BPJT terhadap BUJT?

Pengaturan jalan tol dilakukan melalui perjanjian perusahaan jalan tol yang mengatur hak dan kewajiban Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pada masa konstruksi, BUJT harus menyiapkan desain, melaksanakan konstruksi, dan menyelesaikannya tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pada masa operasi, BUJT harus melakukan operasi dan pemeliharaan jalan tol sehingga selalu dalam kondisi baik. BPJT secara reguler melaksanakan pengawasan atas semua kewajiban BUJT, termasuk sanksi apabila tidak dipenuhi.

Mengapa BUJT mulai memberlakukan penggunaan uang elektronik?

Pemberlakuan uang elektronik dilakukan untuk mempermudah aksesibilitas jalan tol dan memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol.



Jalan tol Salatiga.

Foto Cahyo Afif Nugroho

Pembayaran nontunai diharapkan mampu mengurangi antrian kendaraan dan mengatasi kemacetan di gerbang tol.

Kami melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan perbankan selaku penerbit uang elektronik terkait ketersediaan uang elektronik, fasilitas isi ulang, sistem pembayaran, dan perangkat pembayaran. Bagi ruas yang sedang dalam tahap konstruksi, peralatan tol disiapkan agar langsung bisa menerima transaksi nontunai 100 persen.

Seperti apa standar pelayanan minimal yang harus disediakan jalan tol?

Standar pelayanan minimal jalan tol memiliki banyak substansi. Beberapa yang paling sering dilihat pengguna adalah adalah tempat istirahat, toilet bersih dan gratis, parkir kendaraan, stasiun pengisian bahan bakar, bengkel umum dan tempat makan. Selain itu, ada juga unit pertolongan dan bantuan. Unit ini mencakup ambulans, kendaraan derek, patroli jalan raya, patroli jalan tol, kendaraan penyelamat dan sistem informasi.

Kemudian untuk kondisi jalan, kami memiliki standar perkerasan jalur utama, drainase, jalur median, bahu jalan dan *rouding*. Dari sisi mobilitas, ada standar kecepatan penanganan hambatan lalu lintas, kecepatan penanganan patroli jalan raya dan kecepatan penanganan derek.

Apa prioritas perbaikan yang akan segera dilakukan?

Peningkatan mutu layanan merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan. Prioritas kami saat ini adalah kondisi tempat istirahat yang lebih handal, asri, dan bersih. Kemudian, penyampaian informasi kepada pengguna melalui sistem manajemen vendor, aplikasi seluler, dan media sosial dan bersifat *real time*.

Kami juga akan meningkatkan layanan transaksi tol non tunai dengan menambah kemudahan fasilitas isi ulang dan penjualan kartu uang elektronik. Selain itu, layanan transaksi *tapping* dengan uang elektronik akan ditingkatkan menjadi nirsentuh atau *multi lane free flow* pada akhir Desember 2018.

Selain itu, integrasi operasi jalan tol akan dilakukan dengan meminimalkan gerbang pembatas. Sebelumnya telah dilakukan di Gerbang Tol Karang Tengah, Gerbang Tol Cibubur Utama, dan Cimanggis Utama. Nantinya akan dilanjutkan di JORR, Semarang Seksi ABC, dan Jalan Tol di Surabaya.

Terkait pembangunan jalan tol yang berkelanjutan, perlu dibuat peta jalan pembangunan jalan tol. Mulai dari persiapan, kepastian pembiayaan, pengadaan tanah, pelaksanaan, termasuk sumber daya hingga operasi. Dengan begitu, pembangunannya akan menjadi lebih terukur dan tidak parsial proyek per proyek. Idealnya, pemenuhan layanan tidak hanya mencapai tetapi melebihi standar pelayanan minimal.

Teks Irma Kesuma

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggara

Tulang Punggung Penerimaan Kalimantan

Geliat Sungai Mahakam yang membelah Kota Samarinda masih sangat terasa ramai dengan segala aktivitasnya. Aliran sungai memang tetap menjadi pilihan jalur transportasi utama di sini. Kapal ponton dan perahu nelayan nampak hilir mudik di bawah gagahnya Jembatan Mahakam yang membentang di atas sungai terbesar di Kalimantan Timur ini.

Di ibukota Provinsi Kalimantan Timur inilah terletak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggara. Meski terletak di Samarinda, KPP ini membawahi tiga kabupaten di luar domisilinya. Daerah pelayanannya meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.

Keberadaan kantor pajak tersebut di kota ini juga bukan tanpa alasan. Pembentukannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE-19/PJ/2007 tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan pembentukan KPP Pratama. Ditambah dengan Surat Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur No. S-15/WPJ.14/BD.0503/2008 tentang pelayanan Wajib Pajak. Mulai tanggal 27 Mei 2008, Kantor Pelayanan (KP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Samarinda berubah menjadi KPP Pratama Tenggara.

Selalu tanamkan rasa kekeluargaan

”Di sini kami adalah satu keluarga

besar, saya lebih suka menggunakan istilah keluarga dibanding rekan kerja,” buka Widodo, Kepala KPP Pratama Tenggara. Komposisi pegawai di lingkungan kantor tersebut mayoritas memang diisi oleh pendatang dari Jawa. Kebanyakan mereka tinggal seorang diri di tanah perantauan ini. Rasa senasib sepenanggungan itu menciptakan *chemistry* kuat yang menjadikan tim mereka sangat solid dan lebih bersinergi.

”Kuncinya adalah tiap hari kami harus selalu merasa bahagia!” lanjut pria yang lahir di Rembang ini. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi dan keterbukaan. Widodo selalu menekankan kepada para stafnya untuk tidak sungkan untuk berbagi dan meminta saran apabila menemui permasalahan. Faktor-faktor tersebut dipercaya bisa menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan percaya.

Jika satu sama lain sudah saling terbuka dan percaya, maka sinergi dan koordinasi lintas seksi akan berjalan lebih baik. ”Contohnya, salah satu WASKON (Seksi Pengawasan dan Konsultasi) sedang *visit* dan melewati daerah AR (*account representative*) lain. Ternyata, di sana sedang ada pembangunan pabrik baru atau ada aktivitas di pertambangan yang sudah tutup. Hal tersebut akan diinformasikan ke yang bertanggung jawab. Semuanya mungkin karena sinergi dan koordinasinya sudah lancar,” jelas Widodo.



Terus berinovasi tanpa henti

Untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada para *stakeholders*, KPP Pratama Tenggara terus menghadirkan inovasi-inovasi yang optimal. Salah satu contoh keberhasilannya berasal dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang membentuk *help desk from* eksteners. Sebuah fasilitas berupa *help desk* khusus yang memudahkan para wajib pajak (WP) dalam mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Selama ini para WP, khususnya yang masih baru dan telat lapor tidak bayar (TLTB), masih dibingungkan dalam mengisi formulir pengajuan. Apalagi saat mereka harus menghitung jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Akibatnya para WP tersebut akan merasa frustrasi dan lebih mudah terpancing emosinya. Jika sudah begitu, para staf harus lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanannya.



Perjalanan *visit* ke wilayah kerja KPP Pratama Tenggara

Widodo, Kepala KPP Pratama Tenggara

Foto Dok. KPP Pratama Tenggara

Belajar dari pengalaman tersebut, para *eksteners* menyampaikan temuan dan memohon izin kepada kepala kantor. Pada 25 April 2017 *help desk from eksterners* ini mulai beroperasi. Inovasi yang dihadirkan tim ekstensifikasi KPP Pratama Tenggara ini merupakan wujud implementasi kesempurnaan dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan. Sebelumnya, pelayanan terhadap WP hanya dilakukan di tempat pelayanan terpadu (TPT). Dengan adanya terobosan berupa ruang pelayanan dan penyuluhan khusus pertama di Indonesia ini, pelayanan yang dibantu dengan teknologi canggih ini dapat diberikan lebih optimal. Tidak ada lagi keramaian dan penumpukan dalam pelayanan wajib pajak.

Berbagi dan menginspirasi

Dalam menjalankan tugasnya, seluruh jajaran di KPP Pratama Tenggara yang berjumlah 102 orang ini mengemban visi mulia, yaitu “Menjadi kantor pajak yang dicintai masyarakat sadar pajak”. Untuk mewujudkannya, ada beberapa pendekatan yang terus dilakukan. Fokus utamanya adalah memberi edukasi dan sosialisasi dengan sisi humanis. Acara kunjungan ke daerah-daerah WP masih terus dilakukan dan seringkali disertai pemberian santunan yang terkumpul dari sumbangan sukarela para staf di lingkungan KPP Pratama Tenggara.

Untuk mencapai lokasi yang dituju tim KPP Pratama Tenggara juga harus melalui medan yang sangat menantang. Jalan tak beraspal membelah hutan harus mereka lewati. Sungai-sungai pedalaman yang masih terdapat banyak buaya pun harus diarungi. Saat hujan, jalanan dibanjiri air sehingga sulit dibedakan dengan sungai di sebelahnya. Belum lagi jalanannya menjadi berlumpur, hingga membuat mobil yang ditumpangi tim terbalik.

Seluruh kunjungan ke berbagai daerah WP tersebut didokumentasikan lalu dipublikasikan ke berbagai platform media sosial yang dikelola tim KPP Pratama Tenggara. Beratnya medan yang harus ditempuh serta ketimpangan infrastruktur yang ditemukan sepanjang perjalanan menjadi cerita yang menarik bagi warganet yang menonton di Youtube. Selain itu dokumentasi tersebut juga jadi penarik simpati saat dijadikan bahan presentasi sewaktu memberikan edukasi dan sosialisasi.

Hasil kerja keras tim KPP Pratama Tenggara dalam meningkatkan kesadaran pajak pun berbuah manis. Pada tahun 2017, Kantor ini berhasil mendapat penerimaan terbesar se-Kalimantan Timur dan Utara. Penerimaan yang dicapai sebesar 91,06 persen dengan pertumbuhan sebesar 17 persen. Gencarnya sosialisasi juga menyebabkan pengetahuan WP tentang pengisian

SPT Tahunan melalui *e-filing* juga terus meningkat. Sehingga para WP tak perlu repot datang jauh-jauh ke kantor untuk melapor pajak mengingat wilayah kerja kantor pajak ini yang memang terluas se-Kalimantan Timur dan Utara.

Kompak melayani, kuatkan sinergi

Supaya lebih dekat dengan WP dan semakin maksimal dalam memberi pelayanan, KPP Pratama Tenggara sedang dalam proses awal pengurusan kepindahan ke Tenggara. Saat ini kantornya memang masih menempati gedung peninggalan KP PBB Samarinda. Meski cukup layak ditempati, namun tak dapat dipungkiri bahwa cepat atau lambat gedung tersebut tak akan lagi dapat mengakomodir kebutuhan operasional di sana.

Selain itu yang terpenting, KPP Pratama Tenggara berharap untuk dapat terus mengimplementasikan *tagline* SUPER GALAKSI (Sinergi untuk Penerimaan dan Penggalan Antar Lini Antar Seksi). Bersinergi dan memberikan pelayanan optimal sehingga target pencapaian dapat terus meningkat dan tetap menjadi yang terdepan dalam penerimaan se-Kalimantan. Dari desa membangun bangsa, meski dengan segala keterbatasan fasilitas harus tetap berkontribusi dengan totalitas.

Teks Dimach Putra

MENGAWAL REFORMASI MEMBANGUN NEGERI

Marwanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan

Menjadi orang pilihan yang masuk ke dalam sistem pemerintahan melalui proses seleksi langsung menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi dirinya. Sebagai salah satu lulusan terbaik Universitas Gadjah Mada, dirinya diberikan amanah pertama kali menerapkan ilmu yang dipelajarinya secara akademis ke dalam dunia riil. Sejak pertama bergabung dengan Kementerian Keuangan pada 1983, ia sudah diberikan tugas untuk menyusun kebijakan fiskal, serta kebijakan makro ekonomi dari perencanaan hingga proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ialah Marwanto Harjowiryono yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb), salah satu tulang punggung pengelolaan keuangan negara di Kementerian Keuangan.

Tidak hanya berpengalaman dalam mengelola kebijakan fiskal, pada 2007 di bawah komando Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ia ditunjuk menjadi Staf Ahli Pengeluaran Negara, sekaligus merangkap sebagai Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan. Di dalam Tim Reformasi Birokrasi, ia memiliki tugas berat untuk mengawal dan menggemakan reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan yang telah diinisiasi oleh Menkeu. Berbagai tantangan, baik dari internal maupun eksternal harus ia hadapi pada masa awal perjuangan reformasi.

Foto
Dok. DJPb



“Ibu Sri Mulyani memiliki artikulasi kebijakan yang sangat bagus, dicintai, dan dikenal oleh publik, dan kemudian beliau juga mempunyai semangat melakukan perubahan. Jadi, reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, yang saat ini paling terdepan dalam implementasinya, merupakan hasil buah pikir dan salah satu karya besar, *masterpiece*, dari Ibu Sri Mulyani,” jelas lulusan Master dari Vanderbilt University, Amerika Serikat ini.

APBN untuk keadilan

Memimpin institusi besar yang memiliki kantor dari Sabang hingga Merauke bukanlah hal yang mudah. Tanggung jawab besar untuk mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selaku instrumen negara yang mampu memberikan solusi atas masalah alokasi yang paling optimal, distribusi yang paling adil, dan mampu mendorong terciptanya stabilisasi ekonomi nasional menjadi fokus utamanya. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera akan dapat dicapai.

Bersama dengan seluruh pejabat dan pegawai di DJPb, ia memiliki tugas menjamin agar setiap alokasi yang direncanakan di dalam APBN dapat tereksekusi dengan baik, dengan kriteria tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tersebut akan menjamin keberhasilan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan APBN sehingga mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang perbendaharaan, Marwanto melakukan berbagai upaya untuk optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Sejak tahun 2014, telah diperkenalkan Modul Penerimaan Negara generasi kedua (MPN G2) sebagai solusi kemudahan pelaksanaan pembayaran kewajiban kepada negara. Selain itu,



dalam rangka penguatan kapasitas fiskal, di bawah kepemimpinan Marwanto, DJPb juga mengimplementasikan aplikasi terintegrasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dan menerapkan basis akrual untuk akuntansi pelaporan keuangan APBN sejak tahun 2015. Di bawah kepemimpinannya juga, mulai tahun 2017 DJPb menerapkan *pilot project* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dengan berbagai inovasi tersebut, ia turut mendorong peningkatan kualitas pertanggungjawaban APBN sesuai dengan standar *good governance* yang dibangun secara global. Hasilnya, pada tahun 2017 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mengawal reformasi birokrasi

Salah satu pengalaman kerja yang paling berkesan bagi Marwanto adalah pada saat mengawal program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Di bawah arahan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, ia harus membangun dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pekerjaan yang sebelumnya tidak memiliki proses bisnis menjadi memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) yang lengkap, dari yang tidak memiliki janji layanan

hingga menyusun janji layanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*, serta dari yang sebelumnya tidak memiliki indikator kinerja sehingga memiliki kontrak kinerja yang disusun setiap tahunnya sesuai dengan prinsip *Balanced Scorecard*. Di bidang pengelolaan SDM, tantangan yang tidak mudah adalah menyusun *grading* yang berjenjang bagi para pejabat yang saat itu memiliki *level* yang sama, dengan mempertimbangkan risiko, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab masing-masing.

“Tantangan yang dihadapi saat itu adalah melakukan perubahan pada saat beberapa institusi Kementerian Keuangan telah berada pada zona nyaman. Ibarat kita mengusik ‘*comfort zone*’ seseorang. Sungguh beruntung bahwa pimpinan Kementerian Keuangan saat itu, Ibu Sri Mulyani Indrawati, adalah seorang yang sangat reformis dan berani melakukan perubahan,” jelas bapak tiga anak penyandang gelar Doktor dari UGM ini.

Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut, Marwanto diberikan kepercayaan menjabat sebagai *Executive Director* di *Asian Development Bank* (ADB). Pengalaman tersebut memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap dirinya untuk menjalin hubungan kerja sama dengan dunia internasional.



Liburan bersama keluarga

Menikmati liburan

Foto Dok.Pribadi

Dalam jabatannya tersebut, ia menjadi Koordinator yang membawahi delapan negara anggota, yaitu Selandia Baru, Fiji, Coke Island, Tonga, Samoa, Armenia, Kazakhstan, dan Indonesia sendiri sebagai *lead*, dengan posisi sebagai *Executive Director*.

Pada tahun 2011, Marwanto diberi amanah oleh Menkeu Agus Martowardoyo untuk memimpin Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Di tempat tersebut, ia diberi tugas untuk membuat formulasi alokasi transfer ke daerah serta menyusun variabel alokasi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tantangan lain yang muncul, ia harus mampu menjaga agar formulasi tersebut benar-benar adil dan tidak menimbulkan gejala serta ketidakpuasan dari daerah maupun badan legislatif.

Harmoni dalam kehidupan

Dalam kesehariannya, Marwanto menaruh perhatian pada kedamaian dan harmonisasi. Tak terkecuali dalam hal lingkungan. Ia gemar menanam berbagai jenis pepohonan yang rindang, hijau, dan asri di rumahnya. Suasana alam yang damai tersebut menjadi media pendukung energi positif untuk memulai aktivitas bersama keluarga.

Kebersamaan dengan keluarga pun menjadi hal yang prioritas bagi dirinya. Di hari libur, tak jarang ia mengajak istri dan anak-anaknya sekedar berjalan-jalan di tengah-tengah kesibukannya. Terkadang, ia juga mengajak keluarga berwisata ke beberapa destinasi wisata eksotis di Indonesia. Di sela waktu luangnya, mantan Kepala Biro Penyusunan APBN, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, dan Kepala Biro Humas, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ini juga rutin menyempatkan berolah raga sebagai aktivitas fisiknya.

Amanah dan ikhlas

Lahir dan besar di Jogjakarta, Marwanto kecil selalu dididik untuk jujur dan ikhlas oleh orang tuanya. Dengan latar kehidupan orang tuanya yang sederhana, ia dan sepuluh saudaranya ditanamkan untuk memiliki jiwa amanah dalam bekerja.

“Orang tua saya merupakan orang tua yang sangat sederhana, yang mendidik sepuluh anak-anaknya untuk disiplin, kerja keras, dan mengedepankan keikhlasan dan menjaga kejujuran. Disiplin, kerja keras, dan kejujuran itulah yang mendorong saya untuk berbuat yang terbaik atas amanah yang diberikan kepada saya,” kenangnya.

Komitmen sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, inovatif, dan berkinerja tinggi juga ditunjukkannya

dengan selalu hadir tepat waktu setiap hari. Tak jarang ia harus bekerja hingga larut malam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di waktu-waktu tertentu, ia juga menyempatkan untuk menempuh perjalanan panjang dengan tujuan mengunjungi kantor-kantor vertikal DJPb yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Ia memiliki slogan hidup bekerja yang terbaik dengan penuh keikhlasan. Hal itu menjadi motivasi yang sering pula disampaikan kepada seluruh jajaran yang berada di bawah kepemimpinannya. Kesempatan untuk menyaksikan dan memantau secara langsung proses pengelolaan APBN di berbagai penjurusan antara dijadikannya sebagai sarana menyemangati para punggawa nagara dana rakka untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam mengelola uang rakyat.

Dengan berbekal amanah orang tua yang diimplementasikan pada pekerjaan dan penugasan yang dilakukannya, ia pun mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan Nasional pada Desember 2017 lalu.

Teks Abdul Aziz

Di Tengah Potensi dan Risiko Global



Dealing Room
DJPPR.

Foto
dok. DJPPR

Di bulan April 2018, komunitas internasional melihat terjadinya pemulihan ekonomi yang cepat (*economic upswing*) yang semakin kuat di berbagai negara, termasuk Indonesia yang terjadi sejak krisis 2008 berlalu. Di saat yang sama tekanan untuk menormalisasi kebijakan yang menjadi peninggalan (*legacy*) krisis semakin tinggi, sehingga ketahanan ekonomi pasca krisis akan diuji. Dengan kombinasi yang sinkron antara kebijakan domestik yang antisipatif dengan kebijakan internasional, diharapkan seluruh negara akan mampu menghadapinya dengan baik.

Proyeksi perekonomian global meningkat

Memasuki kuartal kedua 2018, persepsi terhadap perekonomian global terus menunjukkan sinyal positif. Hal itu juga dikonfirmasi salah satunya oleh Dana Moneter Internasional (IMF) melalui rilis

resmi terakhirnya. Ekonomi global yang positif dipercaya akan memberikan daya ungkit terhadap ekonomi domestik.

Laporan *surveillance* perekonomian global, atau dikenal sebagai World Economic Outlook (WEO), pada April 2018 menyebutkan bahwa *economic upswing* akan terus terlihat di tahun ini dan tahun mendatang. Perekonomian negara-negara maju akan terus meningkat di atas level potensinya sebelum kembali menurun di tahun 2020. Lebih rinci, IMF memprediksi perekonomian global akan tumbuh lebih tinggi sebesar 0,2 *percentage point* di atas proyeksinya pada bulan Oktober 2017, yaitu 3,9 persen (*year on year*). Akselerasi yang besar ini terutama akan terjadi di Zona Euro, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, serta negara-negara eksportir komoditas. Di samping itu, perekonomian *emerging market* dan negara berkembang juga diperkirakan akan terus meningkat.

Meskipun masih terdapat sebaran,

menurut IMF, pertumbuhan negara-negara di dunia yang sekuat ini belum pernah terjadi sejak krisis keuangan global 2008-2009 berlalu. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan positif yang sinkron dan menyeluruh sehingga sangat baik bagi setiap negara. Salah satu alasan dibalik argumen tersebut adalah aktivitas perdagangan dan investasi global yang meningkat sehingga menjadi pendorong kuat perekonomian global.

Meskipun menunjukkan iklim yang positif secara umum, di sisi lain terdapat beberapa risiko struktural, misalnya produktivitas yang belum pulih ke level sebelum krisis di beberapa negara maju seperti Tiongkok yang bertransisi ke *lower growth*, serta faktor kebijakan lainnya, baik di sektor riil maupun keuangan.

Di sektor riil, kebijakan yang menjadi risiko utama adalah restriksi perdagangan dan resiprositas atasnya. Selanjutnya,

kebijakan fiskal negara dunia yang tidak sinkron, dalam hal ini misalnya Amerika Serikat yang ekspansif di saat Asia dan Zona Euro yang sebaliknya kontraktif, dikhawatirkan memperparah dampak kebijakan restriksi perdagangan.

Di sektor keuangan, kebijakan yang menjadi risiko adalah percepatan normalisasi kebijakan moneter *unconventional* yang semula didesain untuk mengentaskan ekonomi dari krisis. Apabila kecepatan normalisasi ini tidak dilakukan dengan fase yang sesuai, kestabilan sistem keuangan menjadi taruhan sehingga perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan.

Kinerja perekonomian domestik bulan April terjaga baik

Kondisi perekonomian Indonesia di bulan April terjaga baik. Terlihat dari rilis data terakhir bahwa neraca perdagangan internasional Indonesia kembali ke level positif setelah tiga bulan berturut-turut sebelumnya mengalami defisit. Ekspor pada Maret 2018 tercatat naik 6,14 persen (*year on year*) dengan nilai US\$15,58 miliar. Sedangkan nilai impor mengalami pertumbuhan hingga 9,07 persen (*year on year*) dengan nilai US\$14,49 miliar, sehingga neraca perdagangan mencatatkan surplus hingga US\$1,09 miliar. *Rebound* di performa neraca perdagangan internasional ini sebetulnya mulai terlihat di bulan Februari 2018 dimana defisit neraca perdagangan terlihat mulai menyempit. Faktor utama yang mendorong neraca perdagangan internasional yang positif adalah semakin baiknya harga komoditas dunia.

Di sisi stabilitas, rilis data inflasi di awal April 2018 menunjukkan bahwa inflasi masih di level yang stabil meskipun terdapat peningkatan. Dikatakan stabil karena peningkatan inflasi Maret 2018 sebesar 0,2 persen (*month to month*) dari sebelumnya 0,17 persen (*month to month*)

lebih disebabkan oleh faktor *supply* dan harga yang diatur Pemerintah (*administered price*). Faktor *supply* yang dimaksud adalah siklus panen dari bahan pangan yang mendorong naiknya komponen *volatile food*, bahkan sebelum musim naiknya yang diperkirakan terjadi pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Secara tahunan, inflasi meningkat ke 3,4 persen (*year on year*) dibandingkan sebelumnya 3,18 persen (*year on year*). Angka inflasi masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia yaitu di angka 3,5 persen dengan plus minus sebesar 1 persen.

Nilai tukar Rupiah juga sedikit mengalami depresiasi. Pada 19 April 2018, Rupiah ditutup pada Rp13.778/US\$ atau terdepresiasi 1,7 persen dari akhir tahun lalu. Tingkat imbal hasil SUN 10 tahun juga meningkat 36,2 basis poin ke level 6,68 persen. Hal ini seiring dengan keluarnya arus modal asing dari portofolio sebesar Rp4,4 triliun secara total dari saham dan SUN yang mengerek turun cadangan devisa dari US\$128,06 miliar di bulan Februari 2018 menjadi US\$126 miliar di akhir bulan Maret 2018. Dengan kondisi domestik dan global di atas, agar mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, suku bunga acuan Bank Indonesia dipertahankan di level 4,25 persen pada Rapat Dewan Gubernur 21-22 Maret 2018.

Konsistensi kinerja perekonomian diakui

Sejak menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di berbagai subaspek, perekonomian Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan. Hal ini tampak dari kembali munculnya pengakuan dari komunitas internasional, yaitu lembaga pemeringkat kredit Moody's yang pada 13 April 2018 lalu meningkatkan peringkat kredit Indonesia menjadi Baa2. Salah satu pendorong peningkatan rating ini adalah konsistennya pelaksanaan reformasi kebijakan ekonomi.

Menurut IMF, kebijakan yang reformis akan menjadi bantalan (*buffer*) penting di tengah meningkatnya pandangan skeptis terhadap kemampuan Pemerintah mempertahankan performa ekonomi di tengah tingkat utang yang meningkat sejak krisis. Skeptisnya pandangan publik juga terjadi di Indonesia, sehingga reformasi yang konsisten diharapkan terus dilaksanakan.

Modal kebijakan ke depan yang dibutuhkan

Di tengah momentum perekonomian global serta risiko yang ada, diperlukan kombinasi kebijakan yang seimbang antara menjaga kecepatan pertumbuhan dan mempertahankan stabilitas. Pertama, kebijakan perlu diarahkan untuk menjaga inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Di samping melanjutkan reformasi struktural, Indonesia perlu fokus dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan bonus demografi



Novi Puspita Wardani
Kepala Subdirektorat Manajemen Portofolio
Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

sebaik-baiknya. Dalam waktu yang sama, Pemerintah perlu membantu sektor yang terpengaruh oleh kedua hal tersebut, seperti *shifting* di pasar tenaga kerja yang bersumber dari sektor industri pengolahan.

Selanjutnya, sebagai negara yang masih akan membukukan defisit neraca transaksi berjalan namun belum mencapai *full employment*, Indonesia masih memiliki ruang kebijakan fiskal ekspansif namun dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Langkah Pemerintah di tahun 2018 telah diarahkan untuk tujuan ini, misalnya dengan mendorong kebijakan perpajakan untuk memberikan insentif kepada dunia usaha, serta di saat yang sama juga menjaga risiko utang agar tetap rendah.

Selain melanjutkan kebijakan nasional yang sudah *on track*, dibutuhkan juga kerja sama antarnegara dalam menjaga aktivitas ekonomi internasional di tingkat multilateral yang terbuka. Hal ini terutama sangat relevan bagi Indonesia. Menurut studi yang dilakukan Prof. Hal Hill¹⁾ Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak kehilangan momentum ekonomi global.

Hal tersebut ditunjukkan misalnya dengan indikator total ekspor dan impor terhadap PDB yang relatif rendah. Secara total, Indonesia yang sudah menjadi negara terbuka sejak lama ternyata masih memiliki rasio yang paling rendah di kelompok ASEAN-6. Selain itu, indikator proporsi terhadap pasar global khusus produk siap pakai di tahun 2015 misalnya, Indonesia dengan indeks 0,47 masih kalah dengan Vietnam yang memiliki indeks 1,08 padahal baru menjadi negara terbuka di tahun 2000.

Pada tanggal 13 April 2018, Moody's memberikan *reward* kepada Indonesia atas perbaikan kerangka kebijakan Pemerintah yang kredibel dan efektif dalam mendukung stabilitas ekonomi makro dengan menaikkan peringkat utang Indonesia dari Baa3 *positive outlook* menjadi Baa2 *stable outlook*.

Secara teori, faktor-faktor lain akan ikut menyesuaikan (*other things equal*). Kenaikan peringkat utang akan berdampak pada penurunan *yield* surat utang melalui transmisi penurunan premi risiko yang diminta oleh investor. Seperti kita ketahui bahwa peringkat utang menggambarkan persepsi risiko dari entitas yang dinilai. Semakin tinggi peringkat utang sebuah entitas, semakin rendah premi risiko yang diminta oleh investor untuk mengkompensasi potensi gagal bayar atas surat utang yang dimilikinya.

Di sisi lain, *government bonds* sering digunakan sebagai *benchmark rate* bagi penerbitan obligasi korporasi maupun instrumen-instrumen lainnya. Di pasar domestik, *government bonds* adalah *risk free assets*. Sehingga secara makro, penurunan *yield government bonds*, sebagai dampak kenaikan *sovereign rating*, berpotensi menurunkan biaya ekonomi secara keseluruhan.

Dalam melakukan *pricing bonds*, investor memperhitungkan *future factors* yang berpotensi mempengaruhi harga *bonds*. Investor SUN tampaknya sudah

well anticipated atas pengumuman Moody's. Selain itu, dari sisi *timing*, *upgrade* ini telah lebih dari satu tahun sejak Moody's merevisi *outlook* dari Baa3 *stable outlook* menjadi Baa3 *positive outlook* pada Februari 2017. Lazimnya, *positive outlook* akan di-*follow-up* dengan kenaikan peringkat utang atau penurunan *outlook* dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu, faktor volatilitas di pasar global juga turut meredam *euphoria rating action* oleh Moody's ini.

Momentum *upgrade* ini, seharusnya memberi angin segar bagi BUMN dan korporasi yang masih memerlukan sejumlah dana dari *market*, terutama investor asing, untuk mendukung pembangunan infrastruktur maupun untuk ekspansi bisnisnya. Apakah secara serta merta *cost of funds* mereka akan turun? Cukup *challenging*. Dengan potensi kenaikan *fed fund rate* 2-3 kali lagi di tahun ini, faktor *trade-war*, dan geopolitik, investor tentu akan melakukan perhitungan.

Namun setidaknya, momentum *upgrade* ini memperluas radar investor asing dan meningkatkan *confident* mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga, dengan terbatasnya kapasitas pasar domestik, korporasi di Indonesia memiliki alternatif sumber pendanaan untuk ekspansi bisnisnya. Akhirnya, kita berharap *capital inflows* akan meningkatkan aktivitas perekonomian di dalam negeri.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Teks Adelia Pratiwi
Staf Khusus Kepala Badan Kebijakan Fiskal

CALL FOR PAPERS 2018

JURNAL BPPK

ISSN 2085-3785



Submit karya ilmiah Anda tentang ekonomi / keuangan negara ke:
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk>

Defisit APBN dan Belanja Berkualitas

Joko Tri Haryanto,
pegawai Badan Kebijakan Fiskal *)



Pembangunan stadion di Palembang merupakan salah satu contoh belanja yang menggunakan APBN.

Foto
Tino Adi P.

Berdasarkan dokumen APBN 2018, tema kebijakan fiskal yang dipilih oleh pemerintah di periode terakhir RPJM saat ini adalah “Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Sesuai tema tersebut, pemerintah kemudian akan memfokuskan beberapa kebijakan terkait dengan pengelolaan APBN sebagai dasar utama mekanisme penganggaran publik di Indonesia.

Beberapa fokus kebijakan tersebut diantaranya dari sisi pendapatan negara dimana pemerintah berusaha melakukan optimalisasi pendapatan melalui penetapan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan basis data terkini. Artinya penetapan target penerimaan perpajakan akan didasarkan atas realisasi penerimaan perpajakan tahun sebelumnya.

Reformasi penetapan target perpajakan yang mendasarkan kepada basis data terkini tersebut diselaraskan dengan upaya pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai alat utama pemerintah di dalam menjalankan mekanisme distribusi pendapatan antar golongan masyarakat dan antar wilayah sekaligus stimulus dalam memacu dunia usaha agar lebih kompetitif. Sementara itu, dari aspek belanja negara, pemerintah telah menyepakati untuk terus melanjutkan penguatan kualitas belanja negara (*quality spending*) dan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran *output* yang telah direncanakan. Dalam periode sebelumnya, komitmen ini sudah dimulai sejak penghapusan subsidi premium dalam APBN, penyesuaian target penerima subsidi listrik serta penyalarsan skema Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Beras Sejahtera (Rastra) melalui penggunaan teknologi dan informasi.

Belanja negara juga akan terus diarahkan terutama untuk

mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar daerah sekaligus program perlindungan sosial untuk pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh pelosok tanah air. Perlu didasari bahwa permasalahan ketimpangan antar wilayah mau tak mau masih menjadi kendala yang menghantui republik ini. Jawa dan Sumatera tercatat masih menjadi penyumbang PDB nasional terbesar di Indonesia, sementara disaat bersamaan Jawa dan Sumatera juga menghadapi permasalahan pengangguran dan tingkat kemiskinan yang relatif membesar.

Terkait efisiensi pembiayaan anggaran, pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk terus mengupayakan pembiayaan defisit APBN dengan tetap memperhatikan rasio utang yang terkendali, pengembangan *creative financing*, serta alokasi untuk *Sovereign Wealth Fund* (dana abadi) untuk pendidikan sebagai simpanan jangka panjang untuk generasi yang akan datang. Pendalaman skema pembiayaan APBN juga akan terus diupayakan demi menciptakan kesinambungan pembiayaan APBN lintas generasi.

Defisit berkualitas

Di dalam APBN 2018, pemerintah telah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun lebih besar dibandingkan target pendapatan negara di tahun 2017 sebesar Rp1.736,1 triliun. Dari besaran tersebut, penerimaan perpajakan

menyumbang sekitar Rp1.618,1 triliun, sementara PNBPN sebesar Rp275,4 triliun dan penerimaan hibah mencapai Rp1,2 triliun. Melihat perbandingan tahun 2017, keseluruhan komponen pendapatan negara kecuali hibah, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi ini memang didukung oleh perkiraan membaiknya permintaan domestik dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen sementara investasi hingga kuartal 3 tumbuh membaik 5,8 persen.

Kenaikan target pendapatan tersebut kemudian disalurkan demi mendukung komitmen pemerintah untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai bergerak di beberapa sektor, melalui kenaikan belanja negara. Di APBN 2018, pemerintah akan menggelontorkan belanja negara sebesar Rp2,220.7 triliun atau naik dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp2.098,9 triliun. Di dalam komponen belanja negara, ditetapkan target belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.454,5 triliun lebih tinggi dibandingkan alokasi tahun 2017 sebesar Rp1.343,1 triliun. Sementara belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp766,2 triliun, relatif naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp755,9 triliun. Masih melanjutkan tren sebelumnya di mana alokasi belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sudah melebihi alokasi belanja K/L yang hanya Rp847,4 triliun dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp769,2 triliun dan belanja non-K/L mencapai Rp607,1 triliun.

Dengan struktur pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka defisit anggaran yang muncul diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun atau sekitar 2,19 persen PDB. Defisit anggaran di tahun 2017 sendiri mencapai Rp362,9 triliun atau 2,67 persen PDB. Defisit keseimbangan primer di 2018 juga diperkirakan mengalami penurunan menjadi Rp87,3 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp144,3 triliun. Dengan tetap menjaga semangat mempertahankan momentum pertumbuhan di satu sisi, sementara di sisi lainnya ekspansi belanja tetap memperhatikan regulasi terkait defisit dan sumber-sumber pembiayaannya jelas menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mengupayakan APBN menjadi semakin inklusif dan kredibel.



Menurunnya defisit keseimbangan primer juga patut diapresiasi mengingat beberapa pihak belakangan ini mempermasalahkan persoalan defisit keseimbangan primer ini. Sebagai informasi, *by definition* yang dimaksud dengan keseimbangan primer adalah sebuah angka yang menggambarkan realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja negara dikurangi pembayaran kewajiban utang. Beberapa pengamat kemudian meyakini bahwa defisit keseimbangan primer inilah sebetulnya menjadi terbaik dalam mengukur aspek keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*), karena sudah mengeluarkan aspek kewajiban pembayaran utang.

Pengamat juga meyakini bahwa negara yang memiliki keseimbangan primer stabil atau bahkan surplus, dianggap memiliki *fiscal space* yang kuat dalam membayar kewajiban beban utang ke depannya. Sebaliknya semakin besar defisit keseimbangan primer, akan memperlebar potensi penarikan utang secara signifikan. Karenanya mereka berpendapat bahwa keseimbangan primer ini diupayakan untuk surplus meskipun sebagian ahli lainnya juga berpendapat bahwa defisit keseimbangan primer bukanlah hal yang tabu asalkan penambahan defisit tersebut betul-betul dialokasikan untuk pembangunan yang memberikan dampak multiplier besar dan berdampak investasi di masa mendatang.

Tren kenaikan defisit keseimbangan primer pada periode pemerintahan sebelumnya lebih banyak didominasi oleh beban subsidi BBM yang terus mengikat APBN. Karenanya beberapa langkah efisiensi dan efektivitas belanja negara yang sudah dimulai, dapat menjadi barometer utama dalam mendukung perbaikan kualitas dari defisit anggaran

sekaligus defisit keseimbangan primer yang muncul.

Perbaikan lainnya juga dilakukan oleh pemerintah melalui percepatan realisasi belanja negara. Sudah menjadi permasalahan klasik bahwa setiap tahunnya, penyerapan belanja negara masih terkendala oleh beberapa faktor teknis dan non-teknis internal pemerintah. Akibatnya muncul pola penyerapan belanja negara yang hampir selalu besar di periode akhir tahun anggaran. Adanya pola yang berkelanjutan dari realisasi APBN di akhir tahun anggaran tersebut mau tak mau kemudian memaksa pemerintah untuk mempercepat proses penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dokumen utama realisasi anggaran. Dan realisasi percepatan penerbitan DIPA sejak dua tahun terakhir ternyata membawa efek positif bagi perilaku penganggaran di tubuh pemerintah.

Sebagai contoh misalnya realisasi belanja negara dalam APBN 2018, hingga periode 31 Januari 2018 sudah mencapai Rp138,4 triliun atau sekitar 6,2 persen dari target APBN 2018 yang mencapai Rp2.220,7 triliun. Pencapaian realisasi tersebut tumbuh hingga 3,9 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp133,3 triliun dari alokasi dalam APBN 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun.

Realisasi belanja modal pun relatif membaik jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Tercatat hingga medio 31 Januari 2018 ini, realisasi belanja modal dalam APBN sudah mencapai Rp1 triliun atau 0,5 persen dari target 203,9 triliun dalam APBN 2018. Sementara di periode 2017, realisasinya baru mencapai Rp600 miliar dari target Rp194,3 triliun dalam

APBN 2017. Hal yang sama juga terjadi untuk realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diharapkan dapat menjadi stimulus pembangunan di daerah dan desa. Per 31 Januari 2018, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari pemerintah ke kas kabupaten sudah mencapai Rp74,5 triliun atau 9,7 persen dari total Rp766,2 triliun dalam APBN 2018.

Beberapa komponen belanja pemerintah lainnya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembayaran kewajiban utang serta bantuan sosial juga terus diperbaiki percepatan realisasinya. Belanja pegawai pemerintah sudah mencapai realisasi 8,8 persen, belanja barang dan jasa mencapai realisasi 0,6 persen, pembayaran kewajiban utang mencapai 9,7 persen sementara belanja bantuan sosial mencapai 6,6 persen semuanya dari total belanja pemerintah pusat dalam APBN 2018.

Berbagai hal positif yang sudah dijalankan oleh pemerintah selayaknya wajib untuk terus didorong dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang senantiasa mengutamakan aspek terciptanya efisiensi dan efektifitas penganggaran publik. Penghematan belanja yang didengung-dengungkan berulang kali, layak untuk diteruskan bahkan ditingkatkan dalam skala yang lebih luas. Begitupula penurunan belanja-belanja non produktif lainnya. Jika sudah terealisasi, penulis yakin keseluruhan kebijakan tersebut akan bermuara kepada terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera di tahun 2030.

**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*

Cermati alokasi anggaran berdasarkan wilayah di
www.peta.data-apbn.kemenkeu.go.id



- statistik -
- belanja pemerintah pusat -
- transfer ke daerah dan dana desa -
- anggaran pendidikan -
- anggaran kesehatan -



Melawan Malnutrisi dengan Ketahanan Pangan

Studi ke Amerika adalah salah satu impian Boimin. Sebab, banyak tokoh nasional di berbagai bidang menyelesaikan studinya di sana. Salah satunya tokoh yang menginspirasi Boimin yaitu Prof. Winarno, Bapak Teknologi Pangan Indonesia.

Ketika masih menjadi mahasiswa di Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Brawijaya, Boimin sering menjadikan buku-bukunya sebagai referensi. Di dorong oleh rasa penasaran, ia kemudian membaca biografi singkat Prof. Win, yang ternyata adalah lulusan Ilmu Pangan di University of Massachusetts (UMASS) Amherst, Amerika.

Beruntung, Boimin menemukan LPDP yang menawarkan beasiswa penuh bagi para pemimpin masa depan. “Bahasa Inggris adalah kendala utama saya saat itu. Saya harus ikut tes TOEFL sampai 7 kali sebelum akhirnya mendapatkan skor yang cukup untuk mendaftar LPDP,” kenang Boimin.

Untuk meyakinkan tim seleksi, ketika wawancara Boimin tidak hanya membicarakan visi misinya. Boimin juga menunjukkan rekam jejaknya dalam kepemimpinan, aktivitas sosial, serta capaian di bidang yang ia geluti. “Saya berusaha menunjukkan benang merah dan konsistensi dari apa yang pernah,

sedang, dan akan saya lakukan untuk membangun bidang pangan serta kelautan dan perikanan Indonesia,” ungkap Boimin.

Mengapa Teknologi Pangan

Soekarno, Bapak pendiri bangsa kita pernah berucap bahwa pangan adalah hidup matinya semua bangsa. Artinya, pemenuhan kebutuhan pangan harus menjadi prioritas. Pernyataan ini memantik ketertarikan Boimin untuk mencari tahu lebih jauh mengenai bagaimana menjamin ketersediaan makanan rakyat di kemudian hari.

Apalagi, Indonesia adalah sebuah negeri bahari. Laut Indonesia begitu luas dan kaya akan sumber pangan, menyatukan ribuan pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Sumber daya perikanan dan kelautan perlu dioptimalkan dalam rangka membangun ketahanan pangan.

“Selain itu, ada slogan yang berbunyi kamu adalah apa yang kamu makan. Bahkan karena begitu pentingnya masalah pangan, hampir semua agama mengaturnya secara khusus, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan,” ujar Boimin.

Secara pribadi, Boimin juga mempunyai pengalaman hidup yang lekat dengan masalah pangan. Boimin adalah

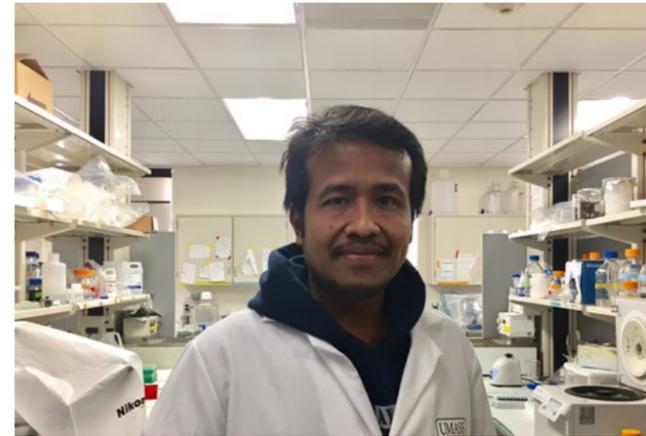
anak ke empat dari lima saudara. Semua saudara kandungnya, 3 kakak laki-laki dan 3 adik perempuan, meninggal dunia akibat malnutrisi. “Saya pun baru bisa berjalan setelah kira-kira berumur 3 tahun karena hal yang sama,” kenangnya.

Anak Desa di Amerika

Harus menetap beberapa tahun di negeri orang tentu menuntut Boimin untuk beradaptasi dengan lingkungan yang benar-benar asing. Berkenalan dengan sistem belajar mengajar yang baru sempat membuat Boimin merasa perlu menyiapkan mental. Boimin menceritakan, di Amerika, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif. Selain itu pola hubungan mahasiswa dan dosen lebih santai dan banyak berdialog.

Mereka juga sering menggunakan beragam teknologi canggih, terutama untuk alat-alat yang digunakan di laboratorium. Sementara, perlengkapan penelitian tersebut masih jarang atau bahkan belum ada di perguruan tinggi di Indonesia. “Hal tersebut sering menjadi tantangan tersendiri bagi saya yang notabene anak desa dan kurang melek teknologi. Butuh waktu bagi saya untuk melakukan penyesuaian,” katanya.

Boimin menuturkan, perbedaan budaya juga membuatnya melihat banyak hal dari sisi lain. “Saya terlahir



Boimin sedang melakukan penelitian di laboratorium.

berkunjung ke Museum USS Constitution Museum

Foto dok. pribadi.

di Indonesia, lebih tepatnya di Jawa, dimana harmoni dan kebersamaan atau *guyup* merupakan hal yang utama. Hal itu berkebalikan dengan budaya orang Amerika pada umumnya, dimana kompetisi dan penghargaan terhadap capaian pribadi begitu besar,” ujar Boimin. Selain itu, jelas Boimin, perbedaan musim dan ketersediaan makanan halal merupakan tantangan yang biasa dihadapi oleh mahasiswa Indonesia. “Alhamdulillah untuk mendapatkan makanan halal di tempat saya belajar semakin mudah, bahkan restoran-restoran di kampus saya menyediakan menu khusus *halal food* untuk mahasiswa muslim,” jelasnya.

Pelari Marathon dan Pendekar Pencak Silat

Menuntut ilmu di luar negeri juga berarti memulai petualangan baru yang berharga. Boimin juga merasakan betapa waktu studinya ini perlu diisi dengan mempelajari banyak hal dengan ragam kegiatan.



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Boimin mengaku menggemari lari marathon. Selama studi di Amerika Boimin sudah mengikuti beberapa lomba lari, diantaranya Boston 10K (Ramadhan 2016), Boston Half Marathon (2016), dan terakhir New York City Marathon (November 2017).

“Alhamdulillah, saya juga telah resmi menjadi peserta Chicago Marathon 2018, bulan Oktober nanti. Mohon doanya semoga kelak saya bisa menjadi *finisher* 6 even marathon terbesar di dunia. New York City Marathon, Chicago Marathon, Boston Marathon, London Marathon, Berlin Marathon, dan Tokyo Marathon,” ujar pria yang pernah menjadi relawan tsunami Aceh tahun 2005 lalu ini.

Boimin juga menyukai pencak silat. Bahkan, Boimin sudah menjadi pendekar pencak di Persaudaraan Setia Hati Terate sejak remaja. “Melalui pencak silat dan marathon saya ingin memberikan contoh bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersungguh-sungguh dalam ikhtiar. Seorang anak malnutrisi dan hampir tidak bisa berjalan pun, dengan kuasa-Nya, bisa menjadi pendekar pencak silat dan pelari marathon,” tutur Boimin bangga.

Mengajar Untuk Indonesia

Ditanya mengenai rencananya selepas studi nanti, Boimin serta merta mengutarakan niatnya untuk menjadi tenaga pengajar di almamaternya di Universitas Brawijaya. Bagi Boimin, bisa berbagi pengalaman dan menginspirasi anak-anak muda memberikan kepuasan batin yang tak ternilai harganya. “Hal itulah yang mendorong saya bercita-cita sebagai dosen. Apalagi, hal itu juga merupakan impian ibu saya,” tutur Boimin.

Untuk mewujudkan impian itu, segera setelah menamatkan pendidikan sarjana tahun 2006, Boimin mengabdikan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Tahun 2011, Boimin mengikuti tes dan lulus seleksi menjadi asisten dosen non PNS. Kemudian, dengan beasiswa LPDP tahun 2015, Boimin melanjutkan pendidikan S3 di Amerika. “Saya adalah manusia biasa yang hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Selebihnya, saya pasrahkan sepenuhnya kepada rencana terbaik-Nya,” ujar Boimin.

Teks Irma Kesuma Dewi

Membaca Arah Super Holding BUMN Indonesia

Teks Agus Darmawan,
Pegawai Sekretariat Jenderal

Program perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lepas dari visi penataan jumlah dan skala BUMN serta perbaikan struktur bisnis secara menyeluruh. UU No 19/2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa restrukturisasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Merujuk praktek di banyak negara, ada beberapa pilihan metode restrukturisasi yang bisa dilakukan. Diantaranya, pembentukan perusahaan induk (*holding*), merger dan akuisisi, penjualan saham kepada publik, penjualan kepada mitra strategis, penjualan kepada manajemen pengelola, kontrak manajemen, serta aliansi strategis lainnya.

Ide pembentukan perusahaan induk adalah untuk optimalisasi manajemen. Apabila beberapa BUMN di sektor yang sama berada dalam satu induk, maka diharapkan dapat saling mendukung. Misalnya dari sisi SDM, distribusi, informasi, dan teknologi. Disamping itu, pembentukan induk akan meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Pada gilirannya anak perusahaan akan bergerak sebagai korporat murni.

Induk BUMN dalam Revisi UU BUMN

Revisi UU BUMN yang akan dilakukan juga perlu memperhatikan

analisis ekonomi terhadap hukum. Secara nilai, induk BUMN mendorong perusahaan BUMN dalam industri yang sejenis untuk berkoordinasi dan berkompetisi secara sehat. Pembentukan induk dan kemudian induk utama (*super-holding*) BUMN kiranya akan memberi nilai tambah bagi Indonesia. Induk BUMN juga dapat meningkatkan kemampuan BUMN dalam era persaingan global.

Dalam konteks efisiensi, pembentukan induk utama akan menghilangkan kepentingan politik partai. Jika diberikan keleluasaan melakukan usaha, tentu kinerja BUMN akan lebih bagus. Sebab, para profesional yang menjalankannya akan menerapkan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Sebab itu, kebijakan Presiden Jokowi untuk merealisasikan induk utama BUMN Indonesia perlu didukung.

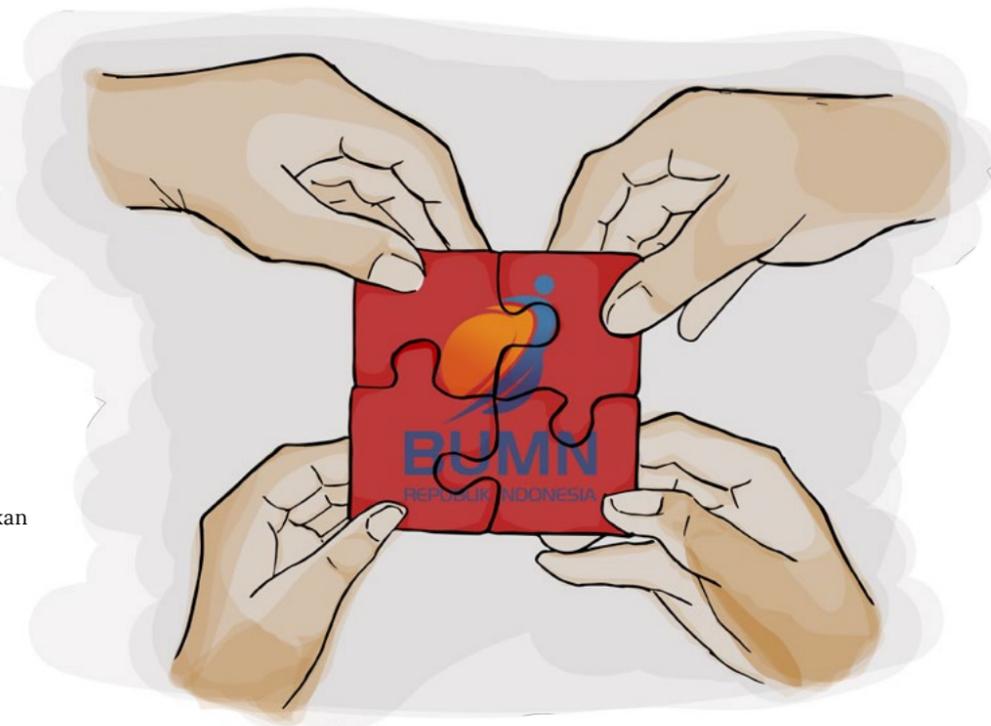
Induk utama BUMN harus diberi pijakan hukum yang kuat. Beberapa hal yang perlu diakomodir dalam revisi UU BUMN antara lain terkait dengan: kelembagaan induk utama BUMN yang akan menghapuskan Kementerian BUMN, kedudukan induk BUMN sebagai agen perubahan, aspek kepemilikan saham pemerintah, pendirian dan pembubaran anak perusahaan, daya saing, serta memastikan tidak tumpang tindih dengan perundang-undangan lain.

Manfaat Induk BUMN

Kementerian BUMN saat ini sudah membentuk induk BUMN. Di antaranya induk BUMN semen dipimpin oleh PT Semen Indonesia, induk BUMN perkebunan yang dipimpin oleh PT Perkebunan Nusantara III, dan induk BUMN pupuk yang dipimpin oleh PT Pupuk Indonesia.

Pemerintah berencana membentuk enam induk BUMN lagi yaitu untuk sektor pertambangan, energi, jalan tol, perumahan, perbankan, dan konstruksi. Jika sudah terlaksana semua, pemerintah segera membangun induk utama dari semua induk BUMN.

Ilustrasi
Dimach Putra



Belajar dari negara lain, pembentukan induk utama BUMN merupakan pilar bisnis kemajuan ekonomi negara. Misalnya, Singapura dengan Temasek, Malaysia dengan Khazanah, Tiongkok dengan China Investment Corporation, dan Jerman dengan Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Negara-negara tersebut memberi pelajaran bahwa dengan induk BUMN, perusahaan BUMN sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip korporasi. Tidak bersifat birokratis dan terbebas dari campur tangan pihak luar. Perusahaan induk akan bertindak sebagai pemegang saham dari perusahaan-perusahaan negara. Prosesnya diimplementasikan dalam bentuk penetapan target, penciptaan kerangka kerja, serta pemberian dukungan sumber daya korporasi sesuai kebutuhan.

Persaingan bisnis yang semakin ketat akan mendorong BUMN Indonesia menjadi lebih kompetitif, kreatif, inovatif, efisien, dan menguntungkan. Dukungan induk utama BUMN Indonesia dalam lobi bisnis dan dagang antar negara akan memperkuat ekspansi bisnis BUMN di tingkat global. Kemudahan pendanaan melalui perbankan dan pasar modal juga diharapkan akan memperkuat struktur keuangan dan permodalannya.

Induk dan induk utama BUMN Indonesia juga memiliki tanggung jawab

sosial yaitu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan negara. Berkenaan dengan masa transisi ke arah induk BUMN, maka pembinaan BUMN oleh Kementerian Negara BUMN perlu dilaksanakan dengan pendekatan korporasi yang responsif, cepat, mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan Induk BUMN

Strategi penguatan induk BUMN juga diperlukan. Strategi tersebut meliputi: Pertama, independensi BUMN. Independen berarti dapat menggunakan instrumen yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa campur tangan pihak luar. Sebagai konsekuensinya, BUMN harus lebih akuntabel dan transparan.

Kedua, penerapan aturan penilaian bisnis. Untuk menentukan apakah seorang direktur melanggar kewajiban untuk berhati-hati, pengadilan menggunakan aturan penilaian dan standar yang adil. Penggunaan prinsip ini

selaras dengan konsep analisis ekonomi hukum, yaitu penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Harapannya, pengelola BUMN dapat mengambil keputusan-keputusan strategis sesuai ketentuan tanpa dihantui bayang-bayang jeratan hukum karena anggapan kerugian bisnis adalah kerugian negara.

Ketiga, penguatan kembali prinsip tata kelola yang baik. Penguatan ini dimaksudkan agar BUMN dapat mempertahankan diri dari intervensi berbagai pihak dan menguatkan mekanisme kontrol serta pemeriksaan dan keseimbangan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, dengan total nilai aset seluruh BUMN pada tahun 2016 sekitar Rp6.500 triliun atau sekitar 50 persen dari PDB Indonesia, penulis berharap tidak ada keraguan untuk segera merealisasikan gagasan induk utama BUMN Indonesia demi kesejahteraan seluruh rakyat.

Perluas Basis Investor, Pemerintah Terbitkan SUN Ritel Online

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

Di era digital, perkembangan pesat internet telah mempermudah manusia melakukan beragam aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan aplikasi untuk sarana transportasi, berbelanja, maupun berinvestasi. Maka, ketergantungan manusia akan keberadaan teknologi menjadi sangat tinggi. Pemerintah berupaya memanfaatkan peluang kecepatan teknologi untuk mempermudah masyarakat berinvestasi, yaitu dengan melakukan suatu terobosan dan inovasi, khususnya dalam instrumen Surat Utang Negara (SUN) ritel *online* untuk pasar perdana domestik. Ketentuan SUN ritel secara *online* ini diatur di dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik yang ditetapkan tanggal 29 Maret 2018 (PMK Nomor 31/2018). PMK 31/2018 antara lain mengatur mengenai mekanisme penjualan SUN ritel secara *online* dan penambahan mitra distribusi dari perusahaan Financial Technology (*Fintech*).

Tahapan Pembelian SUN Ritel

Dalam PMK tersebut diatur mekanisme pemesanan pembelian SUN Ritel oleh investor ritel melalui 2 cara, yaitu dapat dilakukan (i) secara langsung kepada Pemerintah melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi (*online*); atau (ii) secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi (*offline*). Cara pemesanan secara *online* merupakan inovasi baru yang menjadi salah satu materi pokok PMK Nomor 31/2018.

Skema pemesanan SUN ritel secara *online* dilakukan

dengan melibatkan dua *interface*. Pertama, *user interface* yang merupakan media elektronik (*web based* atau *mobile application*) yang disediakan mitra distribusi untuk dapat diakses calon investor secara langsung. Kedua, *system interface*, yakni media elektronik yang disiapkan oleh mitra distribusi untuk mengakses sistem e-SBN (*API SBN Gateway*), yang juga terkoneksi dengan sistem MPN-G2, SIMPONI, DMFAS, SPAN dan sistem setelmen Bank Indonesia.

Tahapan pembelian SBN ritel pada dasarnya cukup mudah. Pertama, calon investor melakukan registrasi terlebih dahulu menggunakan internet untuk melengkapi data investor melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi. Adapun persyaratan yang diperlukan untuk dapat melakukan pembelian adalah individu atau Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada proses registrasi, calon investor paling kurang menyampaikan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification/SID*), nomor rekening surat berharga, dan nomor rekening dana yang dimilikinya. Bagi calon pembeli yang belum memiliki ketiga hal tersebut, proses pembuatannya dapat dibantu oleh mitra distribusi. Setelah registrasi berhasil dilakukan, tahapan pemesanan pembelian dilanjutkan dengan mengisi formulir pemesanan yang tersedia secara elektronik. Dalam tahapan ini, investor diwajibkan untuk membaca dokumen penjualan SUN ritel berupa memorandum informasi yang memuat antara lain struktur produk SUN ritel dan tata cara pelaksanaan pemesanan pembelian. Pada tahap selanjutnya, pemesanan akan diteruskan secara *real time* ke sistem e-SBN.

Setelah itu, sistem e-SBN akan melakukan validasi mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 18 PMK Nomor 31/2018, Kementerian Keuangan

berhak menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh pemesanan pembelian SUN ritel. Kalau diterima, investor akan mendapatkan kode *e-biling*. Di dalam proses selanjutnya, investor harus melakukan pembayaran ke bank persepsi dengan batas waktu yang ditentukan.

Pada tahap terakhir proses tersebut, investor akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) setelah melakukan klaim pembayaran ke perbankan melalui transfer maupun mendatangi bank yang ditunjuk. Setelah keluar NTPN, order investor akan dinyatakan lengkap. Kemudian, proses dilanjutkan dengan setelmen. Berdasarkan Pasal 20 PMK Nomor 31/2018, setelmen penjualan SUN ritel dilakukan pada 2 hari kerja setelah penetapan hasil penjualan SUN ritel (T+2).

Setelah dilakukan penetapan hasil penjualan, hasil penjualan SUN ritel diumumkan kepada publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PMK Nomor 31/2018, pengumuman hasil penjualan tersebut paling sedikit memuat bentuk SUN ritel, seri dan nilai nominal SUN ritel, tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil (*yield*) SUN ritel, dan tanggal jatuh tempo.

Fintech Menjadi Mitra Distribusi

Dalam rangka penjualan SUN ritel, Pemerintah dapat menetapkan mitra distribusi yang membantu melakukan pemasaran, penawaran, dan atau penjualan SUN ritel. Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 31/2018 terdapat terobosan baru pilihan saluran untuk berinvestasi. Selain bank dan perusahaan efek, perusahaan *Fintech* (*Financial Technology*) juga berpeluang untuk berpartisipasi sebagai mitra distribusi. Ketiganya di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu tugas mitra distribusi adalah melayani pemesanan pembelian

SUN ritel, baik untuk pembelian secara langsung (*online*) maupun pemesanan secara tidak langsung (*offline*).

PMK Nomor 31/2018 mengatur tata cara dan kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra distribusi, penetapan dan pencabutan mitra distribusi, hak dan kewajiban, evaluasi, serta sanksi yang bisa diberikan Kementerian Keuangan kepada mitra distribusi. Untuk dapat menjadi mitra distribusi, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 31/2018. Namun, penolakan menjadi mitra distribusi pun dapat saja terjadi. Penolakan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen, kebutuhan jumlah mitra distribusi, efektivitas pemenuhan target penerbitan SUN ritel, dan/atau rekam jejak bank, perusahaan efek, dan/atau perusahaan *fintech* sebagai calon mitra distribusi..

Setelah calon mitra distribusi berhasil ditetapkan menjadi mitra distribusi, mereka harus melakukan perjanjian kerja antara mitra distribusi dengan Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko yang berisi antara lain hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, besaran imbalan jasa/*fee*, keadaan kahar dan sanksi.

Penutup

Aturan SUN ritel *online* ditetapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memudahkan masyarakat melakukan investasi. Di era serba digital, pemesanan pembelian secara *online* diharapkan dapat memperluas jangkauan basis investor dan meningkatkan kualitas keritelan investor serta di saat bersamaan mensukseskan program keuangan inklusif (*financial inclusion*) yang sedang dicanangkan Pemerintah saat ini.

Teks Budi Sulistyono



Ilustrasi
Anindito Dwi
Novenska

Jatuh Cinta pada Sejarah

“**B**angsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya,” begitulah kutipan mahsyur dari pidato Sang Proklamator Ir. Soekarno pada tahun 1961. Namun tak banyak generasi muda saat ini yang memahami sejarah bangsa.

Ialah Darmawan Sigit Pranoto yang sejak masa sekolah bercita-cita bekerja dengan mengenakan seragam kedinasan yang gagah. Sigit, sapaan akrabnya, membayangkan kelak ia akan menjadi polisi hutan atau petugas berseragam lainnya. Maka ketika duduk di Sekolah Menengah Atas 1 Slawi, ia bergabung menjadi Patroli Keamanan Sekolah, bahkan mendapat tanggung jawab sebagai Wakil Ketua. Berbekal cita-cita itulah, Sigit kemudian memilih jurusan Teknologi Hasil Hutan Institut Pertanian Bogor dan Program Diploma III Kepabeanaan dan Cukai STAN. Keduanya diterima, namun



pada akhirnya Sigit memilih STAN. Belakangan Sigit menyadari almarhumah ibunya suatu hari pernah berharap agar anaknya yang sejak kecil sakit-sakitan ini kuliah di kampus kedinasan saja agar bisa langsung bekerja.

Selepas kuliah, Sigit mendapat amanah *on the job training* (OJT) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada tahun 2004 hingga 2005. Kemudian ia ditempatkan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe B Kendari pada 2005 hingga 2007. Tahun 2007 hingga 2013, Sigit mengabdikan diri di KPPBC Kudus Jawa Tengah. Di Kudus inilah awal mula Sigit mulai mendalami sejarah organisasi tempatnya mengabdikan.

Terinspirasi buku Kusmayadi

Awalnya, Sigit mendapat penugasan untuk menulis profil kantor KPPBC Kudus. Dalam menyusun narasi tersebut, Sigit mengacu referensi dari profil kantor KPPBC Kediri dan buku “Pertumbuhan dan Perkembangan Bea Cukai Dari Masa Ke Masa” (terbit 1995) karya Kusmayadi. Setelah itu Sigit membuat sebuah artikel singkat tentang sejarah bea dan cukai. Sigit menuliskan fungsi Bea dan Cukai sudah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan, namun belum ada bukti tertulis yang menguatkan hal tersebut. Tulisan yang diunggah di blog pribadi sekitar tahun 2009-2010 ini pun kemudian menjadi referensi di situs DJBC. Selain itu, tulisannya juga luas tersebar di berbagai forum internet, menjadi rujukan publikasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, hingga disadur tanpa izin dalam sebuah buku komersial tentang hukum kepabeanaan.

Bagaikan seorang anak kecil yang tak hentinya membaca sebuah buku cerita, Sigit pun semakin tenggelam dalam menyelami sejarah Bea dan Cukai Indonesia. Tak hanya buku karya Kusmayadi yang menjadi minatnya, namun juga buku-buku sejarah organisasi lain. Sampai suatu hari, Sigit pun menemukan dalam sebuah buku karya seorang filolog (orang yang mempelajari manuskrip kuno) bahwa di dalam Negarakertagama disebutkan terdapat iuran bernama Palawang bagi pedagang asing yang berdagang di Majapahit. “Pas tahu ada bukti tersebut, saya seperti menemukan eureka. Saya senang sekali,” ujar Sigit



Saat menjadi narasumber pada sebuah seminar

Foto dok. pribadi.

Melalui karyanya, Sigit ingin menumbuhkan kebanggaan pada pegawai Bea dan Cukai

Foto Anas Nur Huda

tersenyum. Artinya, bea masuk sudah ada sejak zaman Majapahit dan kini telah ditemukan bukti tertulisnya.

Upaya Sigit menyusun buku mengenai sejarah Bea Cukai didasari oleh keinginan kuat untuk memperbaiki narasi sejarah yang dipublikasikan di blog dan telah menjadi rujukan berbagai sumber tersebut. Di sisi lain, Sigit menemukan tak sedikit pegawai DJBC, bahkan mahasiswa jurusan Kepabeanaan dan Cukai Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, yang kurang memahami sejarah organisasinya. “Jika ingin DJBC menjadi organisasi besar, sejarah harus dipahami terlebih dulu. Kita tidak pernah mencapai suatu tujuan tanpa tahu dari mana kita berangkat,” tegasnya.

Tahun 2013 Sigit mendapat amanah menjadi Kepala Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan KPPBC Pontianak. Di Pontianak, pria yang pernah menjadi Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa STAN 2010/2011 semakin banyak mengumpulkan literatur sejarah untuk mendukung penyusunan buku sejarah Bea dan Cukai Indonesia.

Awalnya, suami dari Fitri Nurhayati Muslim ini bercita-cita untuk menyusun buku “Customs for Dummies” atau Bea dan Cukai untuk pemula. “Saya miris banyak orang belum mengenal petugas

Bea dan Cukai. Kami sering disamakan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, petugas pelabuhan, atau satuan pengamanan (satpam),” ujarnya. Dengan cukupnya data mengenai sejarah Bea dan Cukai, Sigit akhirnya memutuskan untuk menyusun buku sejarah terlebih dahulu.

Akhirnya usaha keras pun berbuah manis. Pada tahun 2015, buku “Sejarah Filosofi Bea Cukai” bisa dinikmati oleh pembaca internal maupun eksternal DJBC. Buku yang diterbitkan oleh salah satu penerbit indie di Yogyakarta ini diakui Sigit masih belum mewakili sejarah Bea dan Cukai Indonesia secara komprehensif.

Penelusuran sejarah

“Saya ingin setiap pegawai DJBC memiliki kebanggaan penuh terhadap jati dirinya,” tegas Sigit mengenai apa yang diharapkan dari pembaca bukunya. Untuk itu, pada tahun 2017 Sigit kembali menerbitkan dwilogi berjudul “Colligimus et Custodimus” dan “Satu Korsia”. “Colligimus et Custodimus” berisi tentang filosofi bea cukai, seperti apa tugas universal Bea dan Cukai dari zaman dahulu yang ternyata sama hingga saat ini di semua negara, mengapa bea cukai di berbagai negara menggunakan unsur-unsur yang sama dalam logonya, dan sebagainya. Sementara itu, “Satu Korsia” berisi mengenai tradisi dan jati diri Bea dan Cukai Indonesia yang diambil dari hikmah perjalanan sejarahnya. Termasuk tradisi jiwa korsia yang selama ini menjadi ciri khas dari Bea dan Cukai dikupas oleh Sigit mulai dari sejarah hingga alasan mengapa tradisi tersebut harus dipertahankan.

Usaha dalam penyusunan buku sejarah tersebut bisa dibayangkan tak mudah. Sigit kerap membeli berbagai buku lawas, yang kebanyakan buku bekas, untuk mengumpulkan sumber sejarah. Sigit pun membedah buku “Pertumbuhan dan Perkembangan Bea Cukai Dari Masa Ke Masa” karya Kusmayadi, mantan Sekretaris DJBC periode 1973-1981 dan mantan Staf Ahli Menteri Keuangan.

Ia juga banyak berdiskusi dengan Kusmayadi dan belajar langsung secara otodidak dengan R.M. Daradjadi. Daradjadi adalah mantan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang saat ini berprofesi sebagai sejarawan nasional dan juga penulis buku populer “Geger Pacinan” yang terbit tahun 2013.

Sigit kini juga pernah bergabung dengan Tim Perumus Hari Bea dan Cukai dan Tim Penulis Buku Sejarah Reformasi DJBC. Adapun Hari Bea dan Cukai sendiri telah ditetapkan pada 1 Oktober yang bertepatan dengan diangkatnya Kepala Pejabat Bea dan Cukai yang pertama pada 1 Oktober 1946. “Sejarah ini belum usai. Saya ingin mendalami masa-masa kelam bea cukai pada saat terbit Inpres Nomor 4 Tahun 1985 yang memangkas kewenangan DJBC di Indonesia,” ujar Sigit yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis di KPPBC Biak.

Teks Pradany hayyu



Bekerja Dengan Visi

Foto
Ilustrasi
Langgeng
Wahyu P.

Dalam pidato acara pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan mengenai pentingnya memilih tujuan. "Bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita merespons, bagaimana kita mengantisipasi, dan yang paling utama adalah tujuan kita. Kalau tujuan negara ini adalah menciptakan masyarakat adil makmur dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang disegani bermartabat di dunia, kita selalu berpikir dengan tujuan itu. Jadi, jangan sampai kita sebagai institusi hanya fokus setiap bulan, setiap tahun, hanya bagaimana mengelola pekerjaan kita seolah-olah dia instrumen yang terpisah dari tujuan bernegara."

Apa yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani sangat lugas, inspiratif, dan *gablang*, mengartikulasikan betapa penting memiliki tujuan yang lebih utuh dalam bekerja. Artinya, bekerja tidak hanya sebatas mencapai target periodik namun sejauh mungkin dimaksudkan untuk meraih visi yang holistik, baik personal maupun global (*shared vision*).

Bila dijabarkan sedikit filosofis, bekerja dengan visi merupakan karakter kepemimpinan. Bekerja dengan visi berarti bekerja dengan memiliki kesadaran bahwa pekerjaannya berguna bagi diri sendiri dan lingkungan. Mampu memahami bahwa setiap pekerjaan memiliki peran penting bagi pekerjaan lainnya. Lebih jauh lagi, mampu menghayati pekerjaannya sebagai sesuatu yang mempunyai nilai sangat berharga baik untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, bahkan abadi.

Jadi siapa saja yang bekerja berdasarkan visi adalah pemimpin. Kepemimpinan tidak identik dengan posisi puncak hierarki dalam organisasi. Sehingga dalam suatu organisasi kepemimpinan itu dapat dimanifestasikan melalui seluruh komponen dalam organisasi: *back office*, *middle office*, dan *front office*. Juga melalui bidang tugas apapun: politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

Ki Hadjar Dewantoro merumuskan credo kepemimpinan tersebut dengan ungkapan yang sangat terkenal, yaitu *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani*.

Demikian besar manfaat dan peran visi dalam kehidupan seseorang. Maka di era 'kids jaman now', yang ditandai dengan tantangan banjir bandang informasi, setiap orang harus memiliki visi yang jelas. Secara psikologis, dengan era keterbukaan, segala informasi sangat riskan menjadikan siapapun latah, labil, dan terombang-ambing. Oleh karena itu bekerja dengan visi maupun *shared vision* semakin urgen diperlukan.

Teks Iwan Syuhada, Pegawai Sekretariat Jenderal



Ready Player One: Petualangan di Dunia Virtual Reality

Judul:
Ready Player One
Sutradara:
Steven Spielberg
Penulis Naskah:
Zak Penn dan Ernest
Cline
Tahun: 2018

“Ready Player One” adalah film fiksi-ilmiah karya sutradara Steven Spielberg yang diadaptasi dari novel karangan Ernest Cline. Film ini bercerita tentang petualangan remaja bernama Wade Watts (diperankan oleh Tye Sheridan) memecahkan teka-teki dalam sebuah *game* berbasis *virtual reality* bernama OASIS untuk menemukan “warisan” yang disembunyikan oleh James Halliday (diperankan oleh Mark Rylance), sang pencipta *game*, yang telah berpulang. Mengambil latar di tahun 2045, “Ready Player One” menggambarkan kondisi dunia yang tidak terawat, sehingga orang-orang lebih tertarik untuk memainkan perangkat *virtual reality*-nya dan menghabiskan waktu bermain di OASIS—karena di OASIS, mereka bisa masuk ke berbagai wahana fantasi, menciptakan karakter sesuai keinginan, dan bahkan menghasilkan uang.

Sejak Halliday mengumumkan teka-teki dan “warisan” yang ia sembunyikan di OASIS, para pemain mulai berhadapan dengan pesaing baru: Nolan Sorrento

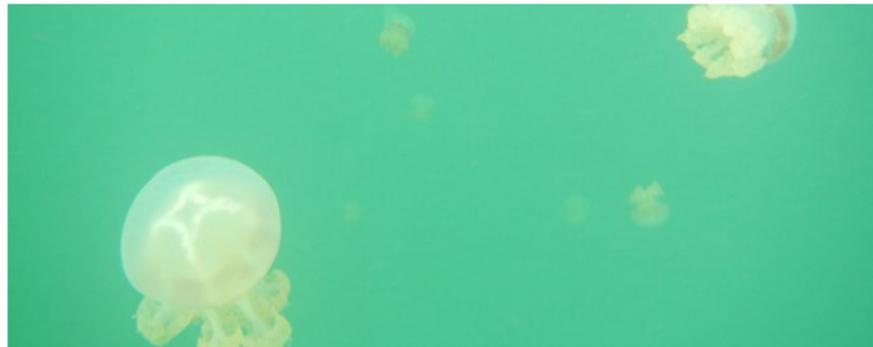
(diperankan oleh Ben Mendelsohn), CEO perusahaan teknologi terbesar di dunia bernama Innovative Online Industries (IOI). Bersama IOI, Sorrento mempekerjakan banyak *gamer* dengan tujuan semata untuk menemukan warisan Halliday dan menguasai OASIS. Watts bersama teman-temannya berusaha mendahului IOI memecahkan teka-teki Halliday, agar OASIS tidak diambil alih oleh Sorrento yang ingin mengubah OASIS dan memanfaatkannya demi kekuasaan dan kekayaannya.

Sudah lama rasanya saya tidak menonton film yang seasyik dan semenyenangkan “Ready Player One”. Faktor utama mengapa film ini jadi sangat asyik untuk ditonton (setidaknya bagi saya) adalah karena terdapat banyak sekali referensi terhadap unsur-unsur budaya pop, baik musik, *games*, serial TV, maupun film Hollywood dan *anime*. Jangan kaget jika dalam “Ready Player One” tiba-tiba ada T-Rex dari film “Jurassic Park”, *godzilla*, *games* klasik Atari, kostum “Thriller”-nya Michael Jackson, King Kong, *game* “Minecraft”, boneka Chucky dari film “Child’s Play”, karakter Hello Kitty, bahkan Gundam.

Saking luasnya referensi *pop culture* dalam “Ready Player One”, mungkin ada kalanya beberapa penonton lain tertawa atau bereaksi terhadap lelucon atau dialog tertentu padahal itu terasa asing bagi Anda.

Jika Anda termasuk yang gemar terhadap musik, film, atau *video game* yang populer dalam beberapa dekade terakhir, menonton “Ready Player One” menjadi tambah menyenangkan. Jika tidak, petualangan Watts dalam warnawarni dunia OASIS tetap akan mampu menghibur Anda selama 2 jam 20 menit durasinya. Ide tentang kekuasaan perusahaan teknologi dalam “Ready Player One” juga mampu menggugah kita akan bahaya di masa depan. Hal ini dikarenakan gejala adiksi terhadap produk teknologi memang telah nyata dirasakan saat ini. Sementara orang-orang sekarang lebih sering menunduk memandang layar *smartphone*-nya, pemain-pemain OASIS telah terkungkung dalam perangkat *virtual reality* mereka dan mengisolasi diri dari dunia nyata yang suram.

Peresensi: Akbar Saputra

Keindahan
kepulauan
Derawan

Kepulauan Derawan yang Menawan

Pagi itu saya sudah berdiri di tepi dermaga Tarakan. Rintik hujan sedari subuh tidak mengurangi semangat saya. Terguncang-guncang di kapal cepat selama tiga jam berikutnya juga tak mengapa. Semua itu demi menjelajahi keindahan Derawan yang termasyur. Kepulauan Derawan terhampar di timur Pulau Kalimantan. Daya Tarik utamanya adalah keberadaan ubur-ubur yang tidak menyengat. Spesies unik ini hidup di sebuah danau air tawar di Pulau Kakaban. Danau itu berisi air laut yang

terjebak jutaan tahun sehingga makhluk hidup yang ada di dalamnya berevolusi. Segera setelah kapal cepat bersandar di Kakaban saya berjalan menyusuri jalur menuju danau. Di sepanjang jalur itu dibuat tangga dari kayu ulin untuk memudahkan wisatawan melewati bukit karst yang curam. Setelah berjalan sekitar tiga ratus meter, saya sampai di tepi danau. Saya pun segera memasang perlengkapan *snorkelling* dan menceburkan diri ke danau.

Pemandangan di depan mata begitu menakjubkan. Sekelompok ubur-

ubur bergerak seirama di jernihnya air danau yang tertimpa cahaya matahari. Namun, kita dilarang menyentuh apalagi mengangkatnya untuk berfoto karena dapat melukai ubur-ubur. Saat *snorkelling* pun disarankan tidak mengenakan kaki katak agar gerakan kita tidak mengenai ubur-ubur.

Ada empat jenis ubur-ubur di Kakaban. Salah satunya adalah ubur-ubur transparan. Jenis lainnya berukuran lebih kecil, hanya seukuran ujung jari. Ada pula ubur-ubur yang berwarna biru kecoklatan

sebesar kepalan tangan. Ubur-ubur jenis ini jumlahnya paling banyak. Sementara, yang paling ikonik adalah ubur-ubur *Cassiopeia ornate* yang berenang terbalik dengan tentakel menghadap ke atas.

Bagi wisatawan yang ingin melihat manta atau ikan pari di alam bebas, *Manta Point* yang berada tak jauh dari Sangalaki bisa menjadi pilihan. Biasanya kawanan manta berburu makanan di dekat permukaan laut. Meski hanya dari haluan kapal, saya bisa melihat dengan jelas gerakan manta yang seolah melayang-layang di sekeliling kapal.

Terumbu karang di sekitar Sangalaki adalah sarang bagi plankton-plankton yang menjadi santapan bagi manta. Sebab itu, manta bisa ditemukan sedang berburu santapan di sekeliling lokasi ini. Saat bulan purnama, kawanan manta yang datang semakin banyak, bisa mencapai hingga dua puluh ekor.

Sangalaki juga menjadi habitat penyu hijau. Hamparan pantai pasir putih dan deretan pepohonan tropis menjadi tempat ideal bagi induk penyu untuk meletakkan telurnya. Pemerintah daerah setempat mendirikan balai konservasi di

Sangalaki untuk melindungi penyu dari pemburu liar.

Lubang-lubang tempat induk penyu meletakkan telur dipasang papan penanda yang dilengkapi jadwal menetasnya tukik atau anak penyu. Tukik yang sudah keluar dari sarang telur akan dikumpulkan di tempat penampungan sementara sebelum dilepaskan ke laut bebas.

Bagi pecandu selam, ada banyak titik yang bisa dijelajahi, misalnya *Barracuda Point* atau *Coral Wall Garden*. Selain terumbu karangnya yang masih sehat, kepulauan ini juga disebut-sebut sebagai salah satu area dengan biodiversitas tertinggi di dunia.

Untuk urusan akomodasi saat ini sudah tersedia banyak pilihan, mulai dari kelas *homestay* hingga resor. Wisatawan bisa menentukan pilihan sesuai anggaran dan kebutuhan. Akses transportasi juga makin mudah sejak dibukanya Bandara Maratua akhir tahun 2017 lalu.

Teks dan foto Adhi Kurniawan, Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dosen Sutradara Yang Mendunia

Foto
Dok. Pribadi

Selain dosen, Yusron Fuadi, atau Yusron, menjadi seorang sutradara independen. Ia mulai bercita-cita untuk membuat sebuah film sejak kecil. Saat itu ia menonton film Star Wars karya George Lucas yang menjadi inspirasi dan juga menjadi *role model*-nya. Awalnya Yusron Fuadi menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia dan mengambil kuliah perfilman. Ia mulai membuat film genre dokumenter pendek, yang direkam dengan kamera seadanya ketika ia bekerja di sebuah kapal pesiar.

Berawal dari film dokumenter dan film pendek, sekarang Yusron berhasil membuat film *feature* panjang bergenre fiksi ilmiah dengan judul Tengkorak. Film ini tayang pertama kali di Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2017 dan berkompetisi dalam Best Fantasy, Scifi & Horror Feature di Cinequest Film & VR Festival di San Jose, California, Amerika Serikat. Yusron tertarik membuat film genre fiksi ilmiah karena di Indonesia jarang sekali yang membuat film bergenre fiksi ilmiah.

Produksi film *feature* panjang fiksi ilmiah dilakukan tahun 2013. Mulai dari menulis naskah, melakukan riset dan pematangan konsep. Yusron mengakui ia adalah seseorang yang terobsesi dengan fiksi ilmiah. Film Tengkorak adalah bentuk protes diri yang muncul karena Indonesia tidak punya keberanian untuk membuat fiksi ilmiah. Menurut Yusron, Indonesia sebagai negara yang kaya mitos dan legenda, bisa memelintir sebuah mitos menjadi karya fiksi ilmiah.

Tahun 2014, dengan penghasilan Rp1,8 juta, ia memutuskan untuk menginisiasi film Tengkorak tanpa ada produser atau penyokong dana. Ia mempunyai tekad yang bulat untuk mengejar mimpi membuat sebuah film. Yusron tidak memikirkan film yang ia buat selesai 2 tahun atau 3 tahun, yang terpenting adalah pembuatan film harus mulai berjalan. *Shooting* pertama dilakukan akhir Oktober 2014 dan dan *shooting* terakhir dilakukan bulan November 2017. Total hari *shooting* gerilya sebanyak 127 hari dan merupakan rekor di Indonesia. Yusron menjadi sutradara sekaligus aktor dalam filmnya. Ia juga mengangkat artis Eka Nusa Perwiti tanpa dibayar. Banyak aktor dan kru memang rela tidak dibayar. Film ini melibatkan 73 kru (sivitas Sekolah Vokasi UGM) ratusan pemain dan bahkan ribuan pemain figuran. Visual Efek di film ini dikerjakan sepenuhnya oleh kolaborasi dosen dan mahasiswa secara *in-house* di Vokasi Studio, Sekolah Vokasi, UGM.

"Pembuatan film tetap ada

naik turunnya, ada saat dimana kehilangan semangat. Tapi ketika melihat mahasiswa, mereka belum tahu perfilman, tapi mereka tidak menyerah, hanya menebak-nebak apa yang ada di kepala saya dan berusaha memberi solusi, ada gengsi dalam diri yang membuat saya untuk terus maju." kata Yusron Fuadi dengan mantap.

Ide yang didapat oleh dosen dan sutradara kelahiran Sleman ini selalu berangkat dari yang ia sukai, mungkin bisa jadi ide yang ia angkat tidak disukai juri namun ia mengatakan bahwa membuat sebuah karya adalah bukan untuk kepuasan juri. Yusron juga tidak berfokus pada *genre* tertentu atau fiksi ilmiah. Yusron mengagumi George Lucas karena saat orang hanya eksplorasi *genre crime* dan *drama*, George Lucas membuat Star Wars dan ditolak di banyak studio sampai akhirnya Century Fox mau membiayai. Namun dapat dirasakan bagaimana sekarang Star Wars begitu populer di dunia.

Teks Abdul Aziz

Mas Praim

Cerita : Dimach Gambar : Bimo Adi





**MEMPERINGATI
HARI PENDIDIKAN NASIONAL
2 MEI 2018**

Foto
Anas Nur Huda



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**